



Katalog: 4401002

STATISTIK KRIMINAL 2017



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK KRIMINAL 2017



STATISTIK KRIMINAL 2017

ISSN : 2089.5291

Nomor Publikasi : 04330.1502

Katalog BPS : 4401002

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 145

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Penyunting :

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

RINGKASAN EKSEKUTIF

Publikasi Statistik Kriminal 2017 ini menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2014–2016. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, pendekatan korban, dan pendekatan kewilayahannya.

Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (*administrative based data*) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (*survey based data*) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data registrasi Polri mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2014–2016 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kejadian kejahatan atau *crime total* dari sekitar 325 ribu kasus pada tahun 2014 menurun menjadi sekitar 353 ribu kasus pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 meningkat menjadi sekitar 357 ribu kasus.

Hal ini sejalan dengan tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2014–2016. Jumlah orang yang terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2014 sekitar 131 orang, menjadi 140 orang pada tahun 2015, dan 140 orang pada tahun 2016.

Data Susenas menggambarkan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2014–2016. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,06 persen pada tahun 2014 menjadi 1,00 persen pada tahun 2015, lalu kembali turun menjadi 0,93 persen pada tahun 2016.

Data Podes mengungkapkan bahwa selama periode tahun 2008–2014 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.300 desa pada tahun 2008 menjadi sekitar 2.500 desa/kelurahan pada tahun 2011, dan kembali meningkat menjadi sekitar 2.800 desa/kelurahan pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kriminal 2017 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum terkait data kriminalitas di Indonesia. Publikasi ini juga menyajikan data statistik di bidang kriminal antar waktu. Penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data yang berasal dari tiga sumber, yaitu laporan registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan BPS.

Data registrasi Polri menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Data Susenas menggambarkan pengalaman menjadi korban kejahatan berdasarkan informasi dari rumah tangga/individu korban kejahatan. Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suharyanto

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II METODOLOGI	7
2.1. Jenis dan Sumber Data.....	9
2.2. Konsep dan Definisi	12
2.3. Penjelasan Teknis	15
BAB III KEJADIAN KEJAHATAN	17
3.1. Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional)	19
3.2. Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda)	20
3.3. Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi (Nasional)	22
3.4. Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayah.....	64
BAB IV KORBAN KEJAHATAN	91
BAB V KONFLIK MASSAL	107
BAB VI UPAYA MENJAGA KEAMANAN	127
DAFTAR PUSTAKA.....	144

DAFTAR TABEL

III. KEJADIAN KEJAHATAN

Tabel 3.1. Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Nasional Menurut Jenis Indikator Tahun 2014-2016.....	34
Tabel 3.2. Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	35
Tabel 3.3. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2014-2016	36
Tabel 3.4. Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2014-2016.....	37
Tabel 3.5. Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2014-2016	38
Tabel 3.6. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2014-2016	39
Tabel 3.7. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2014-2016	40
Tabel 3.8. Banyaknya Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, Tahun 2014-2016.....	41
Tabel 3.9. Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan di Tahun 2016	42
Tabel 3.11. Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2014	46
Tabel 3.12. Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2015	52
Tabel 3.12. Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2016	58
Tabel 3.13 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	68
Tabel 3.14 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2008, 2011, dan 2014	69
Tabel 3.15. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	70
Tabel 3.16. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011,dan 2014.....	71

Tabel 3.17. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	72
Tabel 3.18. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	73
Tabel 3.19. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	74
Tabel 3.20. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	75
Tabel 3.21. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	76
Tabel 3.22. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	77
Tabel 3.23. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	78
Tabel 3.24. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	79
Tabel 3.25. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	80
Tabel 3.26. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	81
Tabel 3.27. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	82
Tabel 3.28. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	83
Tabel 3.29. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	84
Tabel 3.30. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	85

Tabel 3.31. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	86
Tabel 3.32. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	87
Tabel 3.33. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	88
Tabel 3.34. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	89

IV. KORBAN KEJAHATAN

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, Tahun 2015 dan 2016.....	98
Tabel 4.2. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015 dan 2016.....	99
Tabel 4.3. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2015 dan 2016.....	100
Tabel 4.4. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dan Melapor ke Polisi Menurut Menurut Provinsi, Tahun 2015 dan 2016....	101
Tabel 4.5. Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapat Penanganan Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2016.....	102
Tabel 4.6. Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, Tahun 2015-2016	103
Tabel 4.7. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan yang Dialami, Tahun 2015	104
Tabel 4.8. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan yang Dialami, Tahun 2016	105

V. KONFLIK MASSAL

Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	112
Tabel 5.2. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	113
Tabel 5.3. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi Selama Setahun Terakhir, 2008	114

Tabel 5.4. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011	116
Tabel 5.5. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014	118
Tabel 5.6. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi Selama Setahun Terakhir, 2008	120
Tabel 5.7. Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011	122
Tabel 5.8. Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014	124
Tabel 5.9. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaiannya Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	126

VI. UPAYA MENJAGA KEAMANAN

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	131
Tabel 6.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2008.....	132
Tabel 6.3. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2011.....	133
Tabel 6.4. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2014.....	134
Tabel 6.5. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2008.....	135
Tabel 6.6. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2011.....	136
Tabel 6.7. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2014.....	137
Tabel 6.8. Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014	138
Tabel 6.9. Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	139

Tabel 6.10.Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	140
Tabel 6.11.Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014.....	141
Tabel 6.12.Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2014	142
Tabel 6.13.Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2014	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>), Tahun 2014 - 2016.....	19
Gambar 3.2.	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) yang dilaporkan dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>), Menurut Polda, Tahun 2016.....	21
Gambar 3.3.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2012 - 2016	24
Gambar 3.4.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2012 - 2016.....	24
Gambar 3.5.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusastraan, Tahun 2012 - 2016.....	25
Gambar 3.6.	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2012 - 2016	26
Gambar 3.7.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2012 - 2016.....	26
Gambar 3.8.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2012 - 2016.....	27
Gambar 3.9.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2012 - 2016.....	28
Gambar 3.10.	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2012 - 2016.....	28
Gambar 3.11.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa dan Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, Tahun 2016.....	29
Gambar 3.12.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, Tahun 2016.....	30
Gambar 3.13.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan dan Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2016.....	31
Gambar 3.14.	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, Tahun 2016	32
 Gambar 4.1.	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Tahun 2014-2016	93
Gambar 4.2.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan berdasarkan Jenis Kelamin. Tahun 2014-2016	93
Gambar 4.3.	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan berdasarkan Kelompok Umur. Tahun 2014-2016	95

I

PENDAHULUAN

https://www.bps.go.id

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (*Maslow, 1943*), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas

menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2017 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Mabes Polri disajikan menurut wilayah/daerah Kepolisian (Polda) dan nasional.

Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu Tahun 2014, 2015, dan 2016. Sedangkan, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian perkelahian massal disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2008, 2011, dan 2014.

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam tujuh bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, sedangkan Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan mengenai statistik/indikator yang disajikan. Empat bab berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan (Bab III), korban kejahatan (Bab IV), kejadian dan karakteristik konflik massal (Bab V), dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah (Bab VI).

III

METODOLOGI

https://www.bps.go.id

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini secara keseluruhan terdiri dari tiga jenis data yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tahun 2014, 2015, dan 2016.
2. Data korban kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2014, 2015, dan 2016.
3. Data jumlah desa menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2008, Podes 2011, dan Podes 2014.

2.1.1. Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Mabes Polri yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahanan/kriminalitas dan bukan kejahanan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahanan masih relatif besar.

2.1.2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014, 2015, dan 2016

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 75.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan, yaitu pada tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Pada 2015, demi penyempurnaan alat ukur dan agar survei korban bisa semakin akurat dalam menangkap pengalaman individu, dilakukan perubahan instrumen dalam instrumen kor Susenas. Sebelumnya hanya terdapat empat jenis kejahatan yang terdapat di Susenas kor yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan lainnya. Sementara pada 2015, BPS melakukan

perluasan cakupan instrumen menjadi lima jenis kejahatan yakni pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Perubahan ini menjadikan data Susenas bisa menangkap lebih banyak pengalaman korban kejahatan. Namun, implikasinya pengguna data tidak bisa serta merta melakukan perbandingan antara data hasil Susenas 2015 dengan data tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya.

2.1.3. Statistik Podes (Potensi Desa) 2008, Podes 2011, dan Podes 2014.

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluhan pertanian (PPL), dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT, dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja, dan tempat ibadat lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi,

Bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antar warga desa maupun antar desa.

2.2. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.

2.2.1. Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Laporan Evaluasi Data Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. *Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran* merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. *Peristiwa yang dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. *Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian*, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaryanya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum).

- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan

2.2.2. Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih

didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih.

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa /kelurahan/ nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.

Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.

Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/ kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/ kelurahan/nagari.

Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

2.3. Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana :

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance*)

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 ()$$

III

KEJADIAN KEJAHATAN

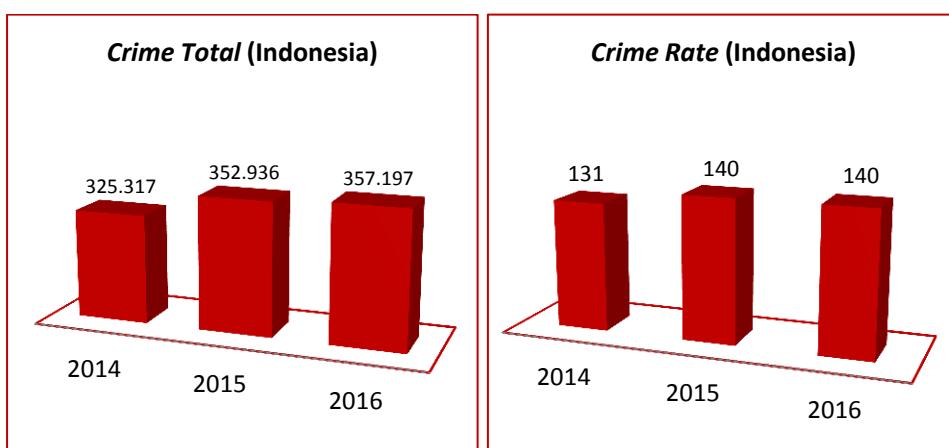
3.1. Angka Kejahatan Secara Umum (Nasional)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu kehatian-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Selama periode tahun 2014–2016, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung meningkat. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.1, data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2014 sebanyak 325.317 kasus, menurun menjadi sebanyak 352.936 kasus pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 357.197 kasus. Sementara itu, jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 131 orang pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 140 orang.

Pada 2016 dari setiap 100.000 orang, 140 diantaranya terkena tindak kejahatan (*crime rate*)

Gambar 3.1.
Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*),
Tahun 2014 - 2016



Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode 2014-2016 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) sebesar 00.01'36" (1 menit 36 detik) pada tahun 2014 dan menjadi 00.01'29" (1 menit 29 detik) pada tahun 2015. Kemudian intervalnya menjadi sebesar 00.01'28" (1 menit 28 detik) pada tahun 2016. Interval waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin meningkat, dan sebaliknya.

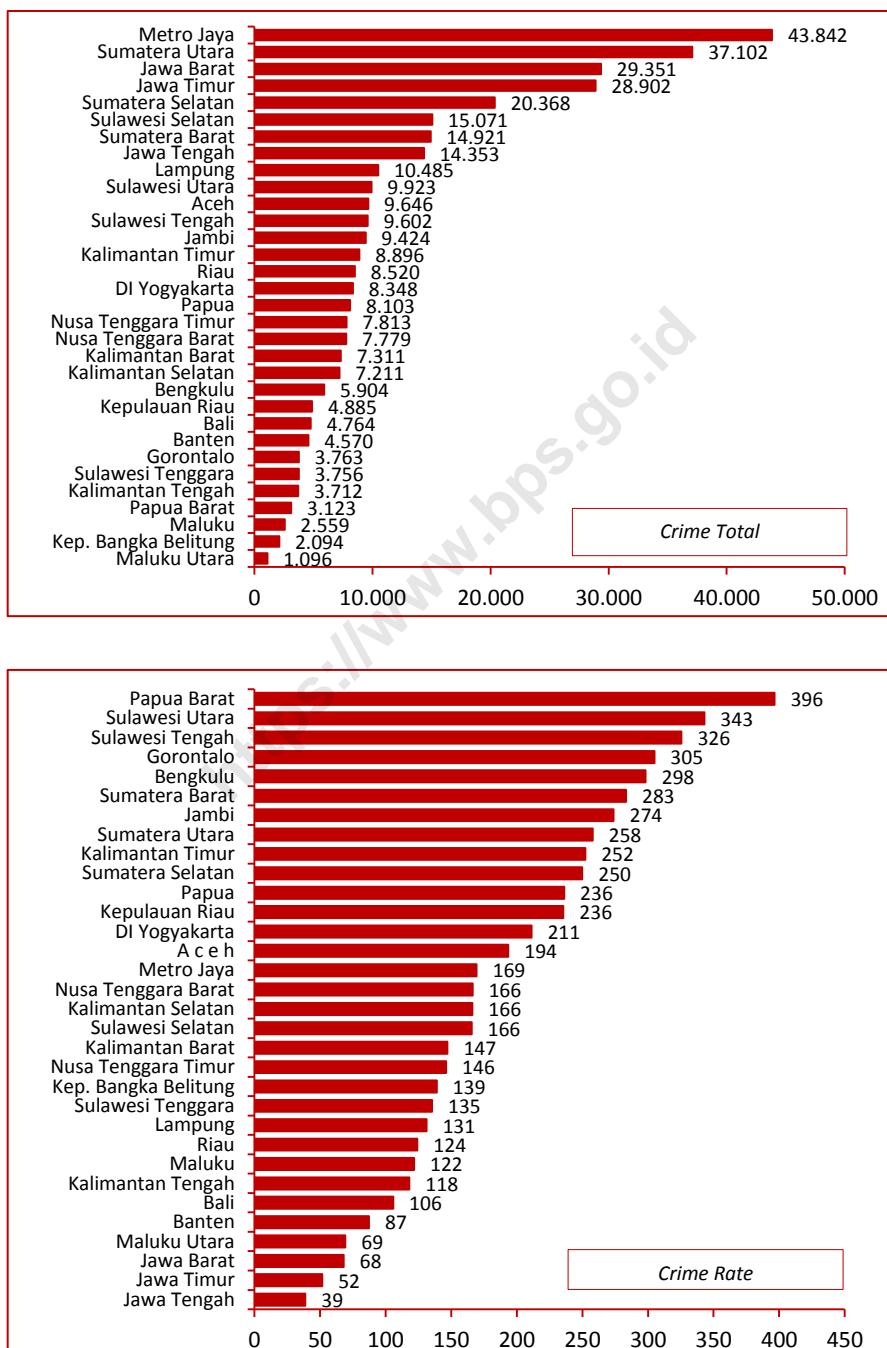
3.2. Angka Kejahatan Secara Umum (Provinsi/Polda)

Dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda, selama tahun 2016 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (43.842 kasus), disusul oleh Polda Sumatera Utara (37.102 kasus), dan Polda Jawa Barat (29.351 kasus). Sedangkan Polda Maluku, Kep Bangka Belitung, dan Maluku Utara dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 2.559; 2.094; dan 1.096, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit (lihat Gambar 3.2). Perlu menjadi catatan bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah.

Meskipun Jawa Barat dan Jawa Timur dari sisi jumlah kejadian (*crime total*) termasuk kategori lima terbesar, tetapi dari sisi tingkat kejahatan (*crime rate*) termasuk kelompok lima terendah. Hal ini tentu karena pengaruh jumlah penduduk. Terkait *crime rate*, Polda Papua Barat mencatat tingkat kejahatan tertinggi yakni 396 (setiap 100.000 penduduk sebanyak 396 orang yang terkena tindak kejahatan), disusul oleh Polda Sulawesi Utara (343) dan Sulawesi Tengah (326).

Pada 2016, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, dan Polda Jawa Barat merupakan Polda dengan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) terbanyak.

Gambar 3.2.
Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) yang dilaporkan dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), Menurut Polda, Tahun 2016



3.3. Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi (Nasional)

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, Negara, dan sebagainya) (Mustafa, 2010).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).

Jenis Kejahatan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keseriusan maupun targetnya (objek).

Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini :

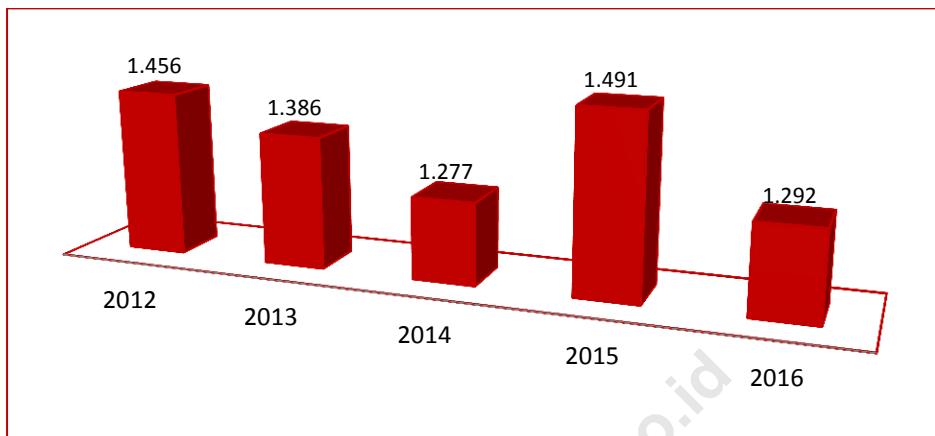
No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan dalam Rumah Tangga

3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran dengan Sengaja Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang Penggelapan Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

Tahun 2016, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/homicide) di Indonesia menurun

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/homicide) di Indonesia cenderung fluktuatif. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.3, memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kasus (jumlah kasus kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).

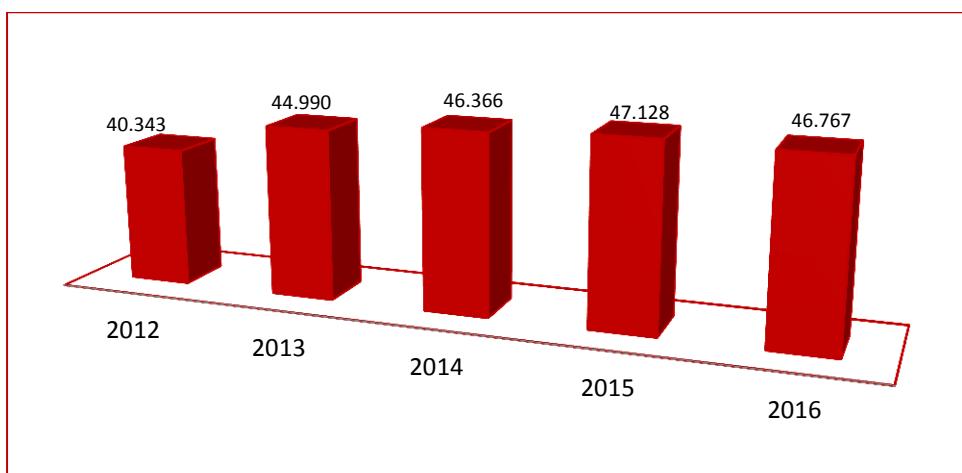
Gambar 3.3.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2012 - 2016



Sementara itu, untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) selama periode 2012–2016 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan Gambar 3.4 pada 2012 terjadi 40.343 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 46.767.

Pada 2012 – 2016, jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik (*violence*) di Indonesia cenderung meningkat

Gambar 3.4.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, Tahun 2012 - 2016



Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia selama lima tahun terakhir tertinggi pada 2014

Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2012-2016 berfluktuasi. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.5, memperlihatkan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 5.499 kasus, menurun menjadi 5.051 kasus pada tahun 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 5.247 kasus.

**Gambar 3.5.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Tahun 2012 - 2016**



Untuk kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk penculikan, selama periode 2012–2016 cenderung meningkat. Berdasarkan Gambar 3.6 pada 2012 terjadi 1.693 kasus, meningkat menjadi 2.212 kasus pada 2015, dan meningkat kembali menjadi 2.885 kasus pada 2016.

Pada 2012 – 2016, jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan (termasuk penculikan) di Indonesia cenderung meningkat

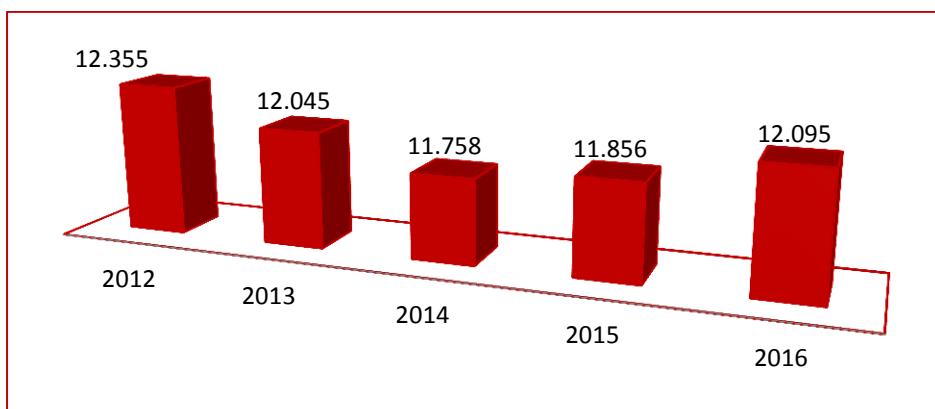
Gambar 3.6.
Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2012 - 2016



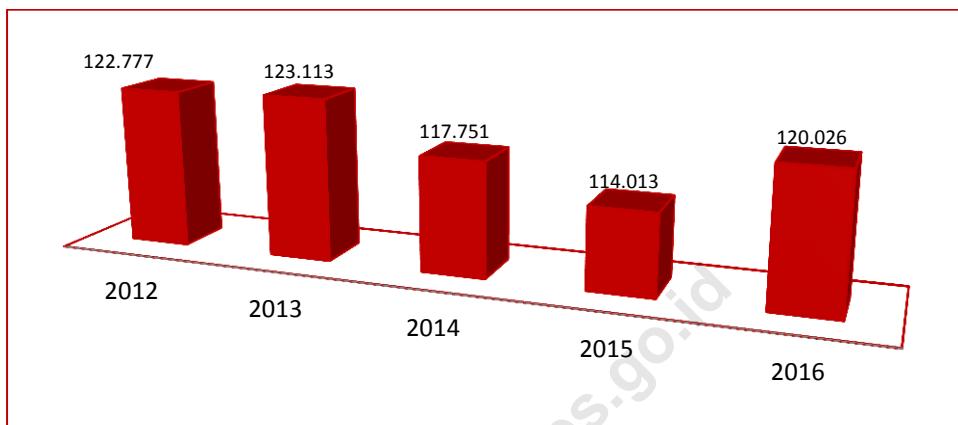
Selama periode tahun 2014–2016, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan (pencurian dengan kekerasan, termasuk dengan senjata tajam/senjata api - *property crime with violence*) di Indonesia cenderung meningkat. Seperti yang disajikan pada Gambar 3.7, memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan pada tahun 2014 sebanyak 11.758 kasus, menjadi sebanyak 11.856 kasus pada tahun 2015, dan meningkat pada 2016 menjadi 12.095 kasus.

Terjadi 12.095 kasus pencurian kekerasan selama 2016 (Mabes Polri)

Gambar 3.7.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2012 - 2016



Gambar 3.8.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2012 - 2016



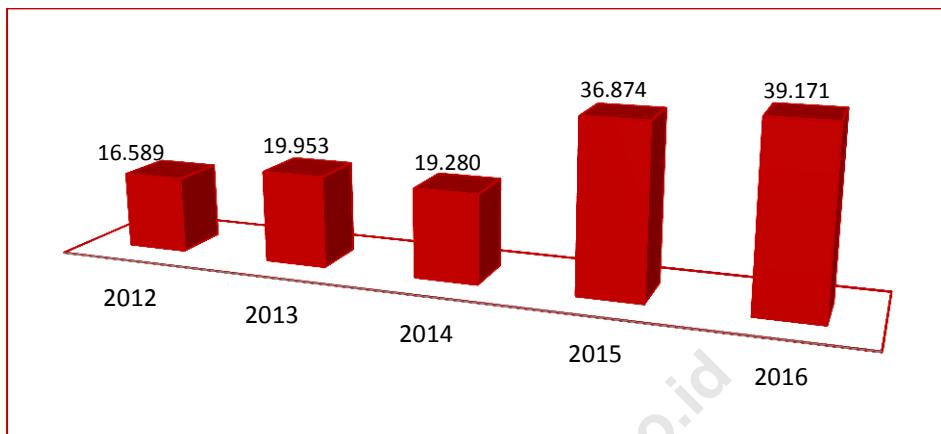
Sementara itu, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan (*property crime without violence*) selama periode 2014–2016 cenderung meningkat. Berdasarkan Gambar 3.8 pada 2014 terjadi 117.751 kasus, menurun menjadi 114.013 kasus pada 2015, dan meningkat menjadi 120.026 kasus pada 2016.

jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (*drugs*) di Indonesia pada 2012 – 2016 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat

Pada 2016, Polri mencatat sekitar 120.026 kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang tanpa Kekerasan. Meningkat sebesar 6.061 kejadian dari 2015

Berdasarkan Gambar 3.9, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (*drugs*) di Indonesia pada 2012 – 2016 cenderung meningkat. Gambar tersebut memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 39.171 kasus dan terendah terjadi pada 2012 dengan jumlah kasus sebanyak 16.589 kasus.

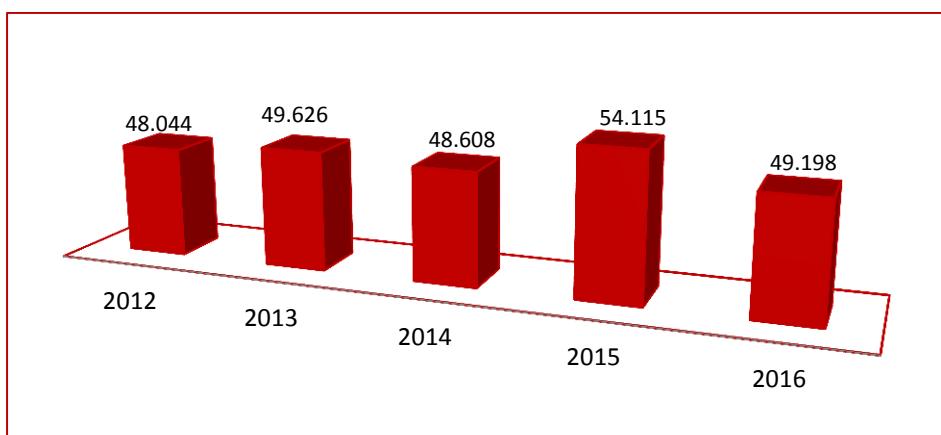
Gambar 3.9.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2012 - 2016



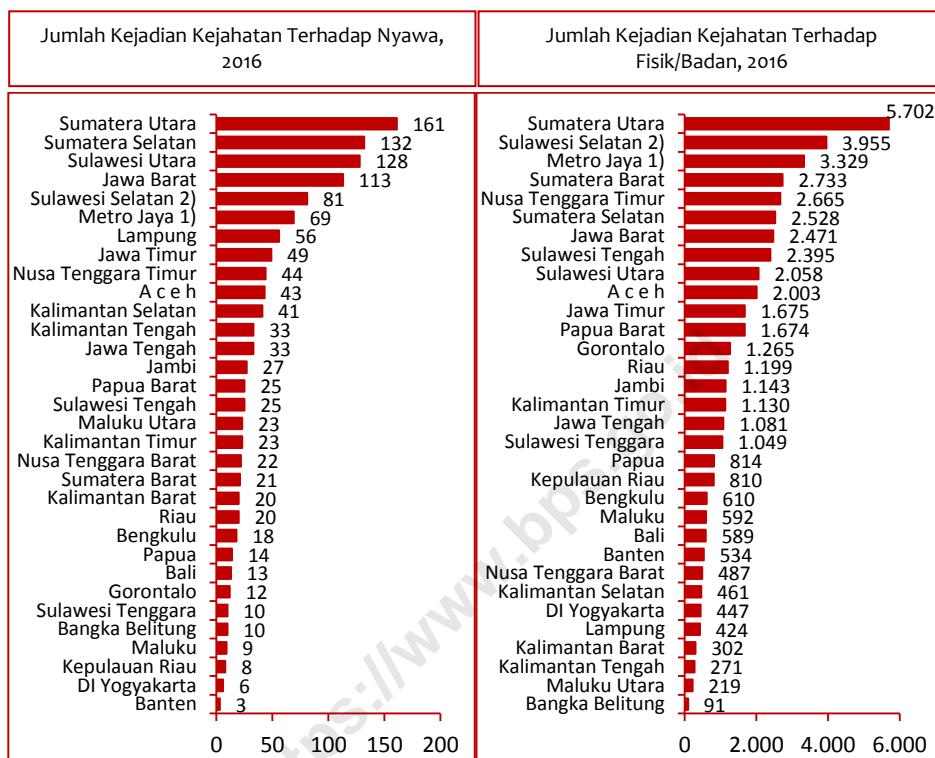
Gambar 3.10 menunjukkan kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri selama periode 2012–2016 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada 2012 terjadi 48.044 kejadian, sementara pada 2016 tercatat 49.198 kejadian. Angka ini meningkat lebih dari 1.000 kejadian sejak tahun 2012.

Terjadi 49.198 kasus terkait penipuan, penggelapan dan korupsi selama 2016 (Mabes Polri)

Gambar 3.10.
Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2012 - 2016



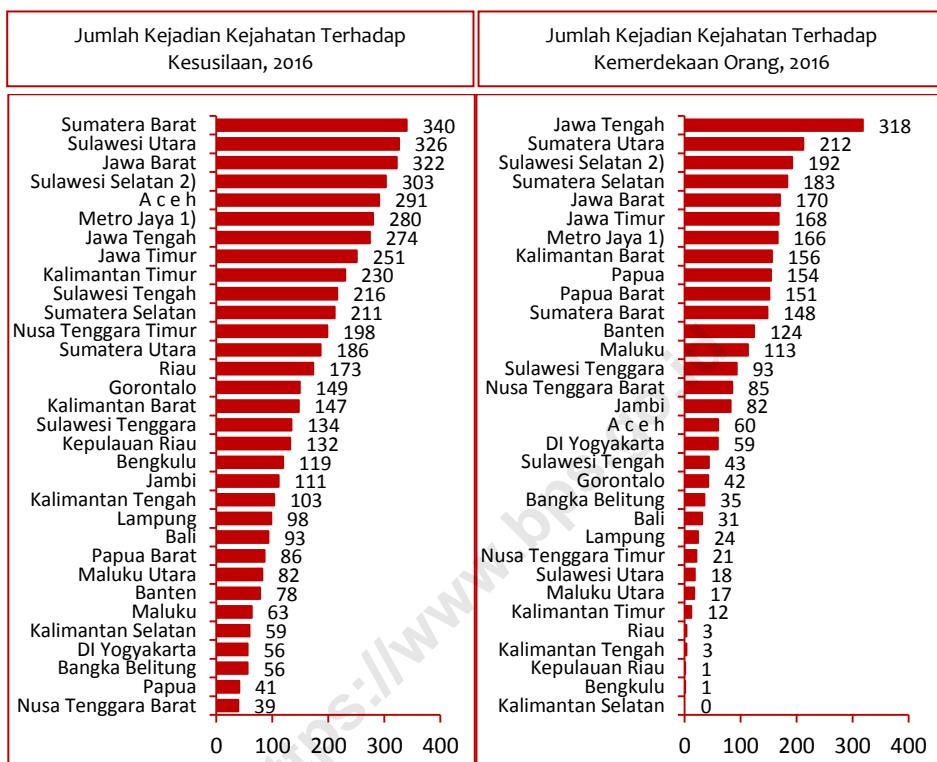
Gambar 3.11.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa dan Kejadian Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda, Tahun 2016



Dari Gambar 3.11 dapat dilihat bahwa tiga Polda yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar adalah Polda Sumatera Utara (161 kejadian), Sumatera Selatan (132 kejadian), dan Sulawesi Utara sebanyak 128 kejadian. Sedangkan Polda dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan Banten dengan jumlah kejadian masing-masing sebanyak delapan, enam dan tiga kejadian.

Dari Gambar 3.11 juga dapat dilihat bahwa jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di Polda Sumatera Utara dengan 6.702 kejadian. Provinsi dengan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 3.955 kejadian. Sedangkan dua Polda yang terdapat kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung masing-masing sebanyak 219 dan 91 kejadian.

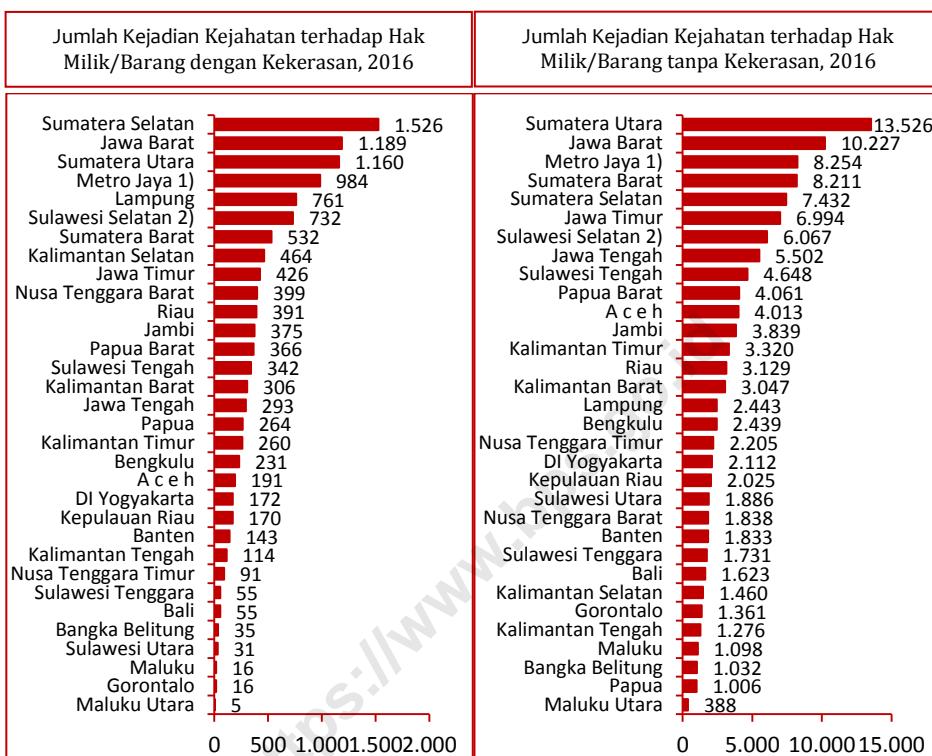
Gambar 3.12.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusaiaan dan Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda, Tahun 2016



Gambar 3.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Polda Sumatera Barat merupakan Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusaiaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 340 kejadian. Di posisi kedua adalah Polda Sulawesi Utara, yaitu sebanyak 326 kejadian. Sedangkan wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Papua dan Nusa Tenggara Barat. Jumlah kejadian di dua Polda tersebut sama masing-masing 41 kejadian dan 39 kejadian.

Gambar 3.12 juga menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang di tahun 2016. Di gambar tersebut dapat dilihat bahwa di Jawa Tengah terdapat kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang terbanyak yaitu sebanyak 318. Di posisi kedua terdapat Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 212 kejadian. Sedangkan Kalimantan Selatan merupakan Polda di posisi terakhir karena di wilayah tersebut tidak tercatat kejadian kejahatan ini di tahun 2016.

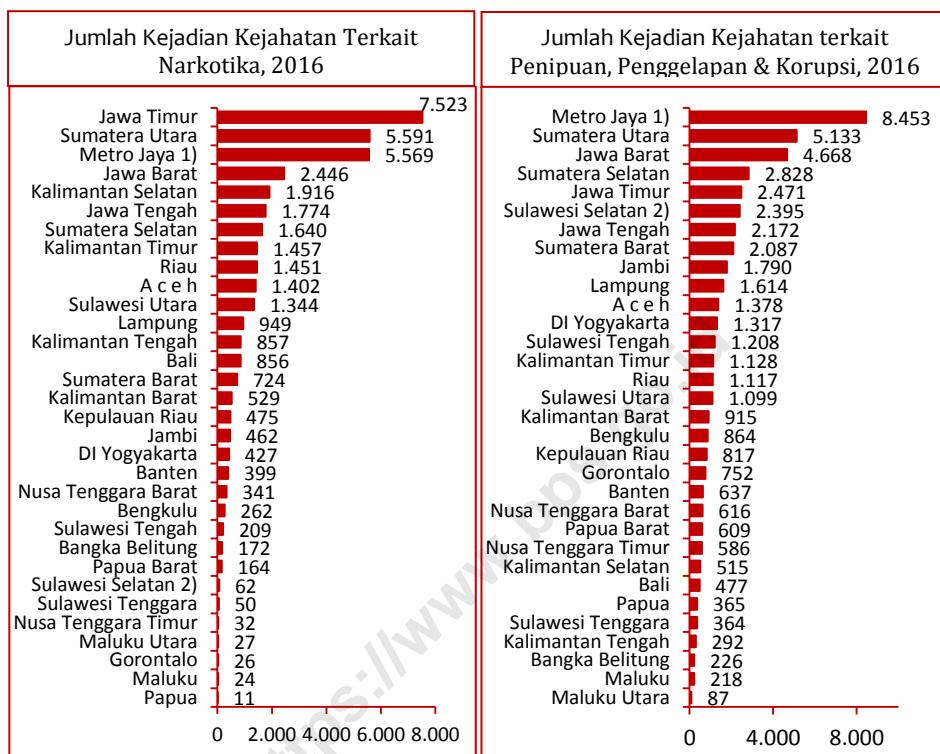
Gambar 3.13.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan dan Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda, Tahun 2016



Gambar 3.13 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan di tahun 2016. Wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak adalah Polda Sumatera Selatan, yaitu sebanyak 1.526 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Jawa Barat dengan 1.189 kejadian. Sedangkan dua wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan paling sedikit adalah Polda Gorontalo dan Maluku Utara. Masing-masing terjadi sebanyak 16 dan 5 kejadian.

Gambar 3.13 juga menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan. Polda Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 13.526 kejadian kejahatan. Di posisi kedua terdapat polda Jawa Barat dengan 10.227 kejadian. Sedangkan wilayah dengan jumlah kejadian dua paling sedikit adalah Polda Papua dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 1.006 dan 388 kejadian.

Gambar 3.14.
Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, Tahun 2016



Gambar 3.14 menunjukkan bahwa jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tahun 2015 paling banyak terdapat di Polda Jawa Timur dengan jumlah 7.523 kejadian, kedua ada di Polda Sumatera Utara. Sedangkan wilayah dengan jumlah kejadian terendah ada Provinsi Papua dengan 11 kejadian.

Kemudian, gambar 3.14 juga menunjukkan Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Metro Jaya, sejumlah 8.453 kejadian. Di posisi kedua terbanyak terdapat Polda Sumatera Utara sebanyak 5.133 kejadian. Sedangkan Polda Maluku dan Maluku Utara adalah provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan ini yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 218 dan 87 kejadian.

DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3.1.
Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas Nasional Menurut Jenis Indikator
Tahun 2014-2016

Jenis Indikator	Tahun		
	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	325.317	352.936	357.197
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	176.530	205.170	209.821
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	54,26	58,13	58,74
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	00.01'36"	00.01'29"	00.01'28"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	131	140	140

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 3.2.
Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*)

No	Polda	Jumlah Kejahatan	No	Polda	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Metro Jaya ¹⁾	43.842	1	Papua Barat	396
2	Sumatera Utara	37.102	2	Sulawesi Utara	343
3	Jawa Barat	29.351	3	Sulawesi Tengah	326
4	Jawa Timur	28.902	4	Gorontalo	305
5	Sumatera Selatan	20.368	5	Bengkulu	298
6	Sulawesi Selatan ²⁾	15.071	6	Sumatera Barat	283
7	Sumatera Barat	14.921	7	Jambi	274
8	Jawa Tengah	14.353	8	Sumatera Utara	258
9	Lampung	10.485	9	Kalimantan Timur	252
10	Sulawesi Utara	9.923	10	Sumatera Selatan	250
11	Aceh	9.646	11	Papua	236
12	Sulawesi Tengah	9.602	12	Kepulauan Riau	236
13	Jambi	9.424	13	DI Yogyakarta	211
14	Kalimantan Timur	8.896	14	A c e h	194
15	Riau	8.520	15	Metro Jaya ¹⁾	169
16	DI Yogyakarta	8.348	16	Nusa Tenggara Barat	166
17	Papua	8.103	17	Kalimantan Selatan	166
18	Nusa Tenggara Timur	7.813	18	Sulawesi Selatan ²⁾	166
19	Nusa Tenggara Barat	7.779	19	Kalimantan Barat	147
20	Kalimantan Barat	7.311	20	Nusa Tenggara Timur	146
21	Kalimantan Selatan	7.211	21	Kep. Bangka Belitung	139
22	Bengkulu	5.904	22	Sulawesi Tenggara	135
23	Kepulauan Riau	4.885	23	Lampung	131
24	Bali	4.764	24	Riau	124
25	Banten	4.570	25	Maluku	122
26	Gorontalo	3.763	26	Kalimantan Tengah	118
27	Sulawesi Tenggara	3.756	27	Bali	106
28	Kalimantan Tengah	3.712	28	Banten	87
29	Papua Barat	3.123	29	Maluku Utara	69
30	Maluku	2.559	30	Jawa Barat	68
31	Kep. Bangka Belitung	2.094	31	Jawa Timur	52
32	Maluku Utara	1.096	32	Jawa Tengah	39
INDONESIA		357.197	INDONESIA		140

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Tabel 3.3.
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kepolisian Daerah
Tahun 2014-2016

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	7.569	8.048	9.646
Sumatera Utara	35.728	35.248	37.102
Sumatera Barat	14.955	16.277	14.921
Riau	9.644	9.595	8.520
Jambi	7.643	10.564	5.904
Sumatera Selatan	22.708	20.575	9.424
Bengkulu	3.847	4.463	20.368
Lampung	7.755	9.218	10.485
Bangka Belitung	1.796	1.875	2.094
Kepulauan Riau	4.633	4.892	4.885
Metro Jaya ¹⁾	44.298	44.461	43.842
Jawa Barat	27.058	27.805	29.351
Jawa Tengah	15.993	15.958	14.353
DI Yogyakarta	7.135	9.692	8.348
Jawa Timur	14.102	35.437	28.902
Banten	5.741	5.002	4.570
Bali	5.072	5.032	4.764
Nusa Tenggara Barat	7.242	6.015	7.779
Nusa Tenggara Timur	6.496	6.709	7.813
Kalimantan Barat	8.019	6.669	7.311
Kalimantan Tengah	2.865	2.681	7.211
Kalimantan Selatan	5.982	6.809	3.712
Kalimantan Timur	9.095	8.764	8.896
Sulawesi Utara	6.163	7.837	9.923
Sulawesi Tengah	7.804	8.988	9.602
Sulawesi Selatan ²⁾	14.925	16.088	15.071
Sulawesi Tenggara	5.284	3.655	3.756
Gorontalo	3.377	3.372	3.763
Maluku	2.394	1.843	2.559
Maluku Utara	1.124	814	1.096
Papua Barat	-	1.356	3.123
Papua	8.870 ²⁾	7.194	8.103
INDONESIA	325.317	352.936	357.197

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua sebelum 2015 masih meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3.4.
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kepolisian Daerah
Tahun 2014-2016

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2014 (1)	2015 (2)	2016 (4)
A c e h	2.492	2.539	4.134
Sumatera Utara	18.465	20.774	23.167
Sumatera Barat	6.898	7.451	6.433
Riau	4.057	5.388	4.565
Jambi	3.093	4.388	2.869
Sumatera Selatan	8.415	9.261	5.051
Bengkulu	2.125	1.997	8.853
Lampung	4.568	6.413	7.261
Bangka Belitung	287	825	883
Kepulauan Riau	2.260	2.511	2.295
Metro Jaya ¹⁾	31.142	30.823	27.983
Jawa Barat	13.873	11.968	13.629
Jawa Tengah	13.194	12.580	12.994
DI Yogyakarta	2.851	4.413	3.427
Jawa Timur	4.842	23.940	18.466
Banten	1.953	1.917	2.715
Bali	3.850	3.867	3.036
Nusa Tenggara Barat	3.903	3.230	6.334
Nusa Tenggara Timur	3.951	4.204	4.302
Kalimantan Barat	4.393	4.548	4.413
Kalimantan Tengah	2.075	1.714	5.666
Kalimantan Selatan	4.190	5.305	2.060
Kalimantan Timur	4.884	4.862	5.522
Sulawesi Utara	4.409	5.178	7.329
Sulawesi Tengah	3.385	4.444	3.885
Sulawesi Selatan ²⁾	11.183	12.264	11.938
Sulawesi Tenggara	2.814	2.125	1.723
Gorontalo	1.518	1.419	1.391
Maluku	544	423	540
Maluku Utara	455	323	506
Papua Barat	-	372	1.296
Papua	4.461 ²⁾	3.704	5.155
INDONESIA	176.530	205.170	209.821

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua sebelum 2015 masih meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3.5.
**Persentase Penyelesaian Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kepolisian Daerah,
Tahun 2014-2016**

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	32,92	31,55	42,86
Sumatera Utara	51,68	58,94	62,44
Sumatera Barat	46,13	45,78	43,11
Riau	42,07	56,15	53,58
Jambi	40,47	41,54	48,59
Sumatera Selatan	37,06	45,01	53,60
Bengkulu	55,24	44,75	43,47
Lampung	58,90	69,57	69,25
Bangka Belitung	15,98	44,00	42,17
Kepulauan Riau	48,78	51,33	46,98
Metro Jaya ¹⁾	70,30	69,33	63,83
Jawa Barat	51,27	43,04	46,43
Jawa Tengah	82,50	78,83	90,53
DI Yogyakarta	39,96	45,53	41,05
Jawa Timur	34,34	67,56	63,89
Banten	34,02	38,32	59,41
Bali	75,91	76,85	63,73
Nusa Tenggara Barat	53,89	53,70	81,42
Nusa Tenggara Timur	60,82	62,66	55,06
Kalimantan Barat	54,78	68,20	60,36
Kalimantan Tengah	70,04	63,93	78,57
Kalimantan Selatan	72,43	77,91	55,50
Kalimantan Timur	53,70	55,48	62,07
Sulawesi Utara	71,54	66,07	73,86
Sulawesi Tengah	43,38	49,44	40,46
Sulawesi Selatan ²⁾	74,93	76,23	79,21
Sulawesi Tenggara	53,26	58,14	45,87
Gorontalo	44,95	42,08	36,97
Maluku	22,72	22,95	21,10
Maluku Utara	40,48	39,68	46,17
Papua Barat	-	27,43	41,50
Papua	50,29 ²⁾	51,49	63,62
INDONESIA	54,26	58,13	58,74

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua sebelum 2015 masih meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3.6.
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kepolisian Daerah
Tahun 2014-2016

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	01.09'26"	01.05'18"	00.54'29"
Sumatera Utara	00.14'42"	00.14'54"	00.14'09"
Sumatera Barat	00.35'08"	00.32'17"	00.35'13"
Riau	00.54'30"	00.54'46"	01.01'41"
Jambi	01.08'46"	00.49'45"	01.29'01"
Sumatera Selatan	00.23'08"	00.25'32"	00.55'46"
Bengkulu	02.16'37"	01.57'46"	00.25'48"
Lampung	01.07'46"	00.57'01"	00.50'07"
Bangka Belitung	04.52'39"	04.40'19"	04.11'00"
Kepulauan Riau	01.53'26"	01.47'26"	01.47'35"
Metro Jaya ¹⁾	00.11'51"	00.11'49"	00.11'59"
Jawa Barat	00.19'25"	00.18'54"	00.17'54"
Jawa Tengah	00.32'51"	00.32'56"	00.36'37"
DI Yogyakarta	01.13'39"	00.54'13"	01.02'57"
Jawa Timur	00.37'16"	00.14'49"	00.18'11"
Banten	01.31'33"	01.45'04"	01.55'00"
Bali	01.43'37"	01.44'27"	01.50'19"
Nusa Tenggara Barat	01.12'34"	01.27'22"	01.07'33"
Nusa Tenggara Timur	01.20'54"	01.18'20"	01.07'16"
Kalimantan Barat	01.05'32"	01.18'48"	01.11'53"
Kalimantan Tengah	03.03'27"	03.16'02"	01.12'53"
Kalimantan Selatan	01.27'51"	01.17'11"	02.21'35"
Kalimantan Timur	00.57'47"	00.59'58"	00.59'04"
Sulawesi Utara	01.25'16"	01.07'03"	00.52'58"
Sulawesi Tengah	01.07'21"	00.58'28"	00.54'44"
Sulawesi Selatan ²⁾	00.35'12"	00.32'40"	00.34'52"
Sulawesi Tenggara	01.39'28"	02.23'48"	02.19'56"
Gorontalo	02.35'38"	02.35'52"	02.19'40"
Maluku	03.39'32"	04.45'11"	03.25'23"
Maluku Utara	07.47'36"	10.45'42"	10.52'55"
Papua Barat	-	06.27'36"	02.48'17"
Papua	00.59'15" ²⁾	01.13'03"	01.04'51"
INDONESIA	00.01'36"	00.01'29"	00.01'28"

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua sebelum 2015 masih meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3.7.
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) per 100.000 Penduduk
Menurut Kepolisian Daerah, Tahun 2014-2016

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2014 (1)	2015 (2)	2016 (3)
A c e h	158	164	194
Sumatera Utara	268	256	258
Sumatera Barat	298	317	283
Riau	157	155	124
Jambi	230	316	298
Sumatera Selatan	290	259	274
Bengkulu	215	242	250
Lampung	99	115	131
Bangka Belitung	134	140	139
Kepulauan Riau	240	255	236
Metro Jaya ¹⁾	186	181	169
Jawa Barat	71	73	68
Jawa Tengah	49	48	39
DI Yogyakarta	201	266	211
Jawa Timur	37	92	52
Banten	115	101	87
Bali	123	123	106
Nusa Tenggara Barat	156	126	166
Nusa Tenggara Timur	131	133	146
Kalimantan Barat	179	141	147
Kalimantan Tengah	124	110	118
Kalimantan Selatan	156	174	166
Kalimantan Timur	230	221	252
Sulawesi Utara	263	328	343
Sulawesi Tengah	281	317	326
Sulawesi Selatan ²⁾	157	166	166
Sulawesi Tenggara	224	149	135
Gorontalo	305	302	305
Maluku	144	111	122
Maluku Utara	101	71	69
Papua Barat	-	160	396
Papua	214 ²⁾	233	236
INDONESIA	131	140	140

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua sebelum 2015 masih meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3.8.
Banyaknya Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, Tahun 2014-2016

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	1.277	1.491	1.292
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	13.996	14.664	14.468
Penganiayaan Ringan	22.984	22.981	21.155
Kekerasan dalam Rumah Tangga	9.386	9.483	11.083
Kejahatan terhadap Kesusailaan			
Perkosaan	1.715	1.739	1.594
Pencabulan	3.784	3.312	3.653
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	336	380	374
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	1.618	1.832	2.511
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	10.414	10.759	10.726
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	332	312	272
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	1.012	785	1.097
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	24.538	26.298	26.636
Pencurian dengan Pemberatan	42.699	41.100	46.277
Pencurian Kendaraan Bermotor	42.165	38.389	37.871
Pengrusakan/Penghancuran Barang	7.207	6.968	7.926
Pembakaran dengan Sengaja	788	721	650
Penadahan	354	537	666
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	19.280	36.874	39.171
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	26.390	30.689	27.421
Penggelapan	21.404	21.646	20.459
Korupsi	814	1.780	1.318
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	4.519	4.227	4.297

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 3.9.
Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan di Tahun 2016

Kelompok/Jenis Kejahatan	(1)	Bulan (2016)		
		Januari	Februari	Maret
	(2)	(3)	(4)	
Kejahatan terhadap Nyawa				
Pembunuhan	148	104	89	
Kejahatan terhadap Fisik/Badan				
Penganiayaan Berat	1.146	1.021	1.254	
Penganiayaan Ringan	2.305	2.059	2.047	
Kekerasan dalam Rumah Tangga	757	1.012	1.096	
Kejahatan terhadap Kesusailaan				
Perkosaan	149	138	140	
Pencabulan	258	307	312	
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang				
Penculikan	45	36	33	
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	195	185	190	
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan				
Pencurian dengan Kekerasan	969	971	893	
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	25	22	21	
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	59	150	105	
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang				
Pencurian	2.288	2.366	2.476	
Pencurian dengan Pemberatan	4.080	4.073	4.014	
Pencurian Kendaraan Bermotor	3.468	3.595	3.518	
Pengrusakan/Penghancuran Barang	604	570	495	
Pembakaran dengan Sengaja	64	66	47	
Penadahan	35	66	42	
Kejahatan Terkait Narkotika				
Narkotika dan Psikotropika	2.985	4.093	4.062	
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi				
Penipuan/Perbuatan Curang	1.755	1.815	1.862	
Penggelapan	2.250	2.380	2.437	
Korupsi	275	82	108	
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum				
Terhadap Ketertiban Umum	411	330	369	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Tabel 3.9.

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2016)		
	April (1)	Mei (2)	Juni (3)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	119	118	74
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	1.177	1.485	999
Penganiayaan Ringan	2.088	1.735	1.260
Kekerasan dalam Rumah Tangga	1.121	1.011	870
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	189	123	104
Pencabulan	295	355	258
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	46	29	20
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	176	373	189
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	911	966	829
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Api	22	15	32
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Tajam	101	112	104
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	2.183	2.317	2.041
Pencurian dengan Pemberatan	3.781	3.972	3.695
Pencurian Kendaraan Bermotor	3.241	3.104	3.001
Pengrusakan/Penghancuran Barang	595	593	484
Pembakaran dengan Sengaja	46	49	19
Penadahan	36	42	35
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	4.448	3.378	3.191
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1.773	1.741	1.573
Penggelapan	2.333	2.406	2.139
Korupsi	97	86	85
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	385	365	314

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Tabel 3.9.

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2016)		
	Juli	Agustus	September
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	97	125	95
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	1.375	1.079	1.435
Penganiayaan Ringan	1.449	1.866	1.611
Kekerasan dalam Rumah Tangga	877	1.029	1.215
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	154	95	149
Pencabulan	302	312	349
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	20	48	27
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	196	196	191
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	783	960	839
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Api	27	26	25
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Tajam	67	92	98
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	1.969	2.191	2.332
Pencurian dengan Pemberatan	3.507	3.766	3.724
Pencurian Kendaraan Bermotor	2.757	3.057	3.069
Pengrusakan/Penghancuran Barang	489	506	594
Pembakaran dengan Sengaja	95	79	59
Penadahan	31	83	88
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	2.451	3.533	3.602
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1.455	1.735	1.702
Penggelapan	1.946	2.370	2.367
Korupsi	108	73	93
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	352	388	389

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Tabel 3.9.

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2016)		
	Okttober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	80	173	70
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	1.377	1.005	1.115
Penganiayaan Ringan	1.665	1.888	1.182
Kekerasan dalam Rumah Tangga	711	766	618
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	131	125	97
Pencabulan	311	331	263
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	20	13	37
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur	177	265	178
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	848	915	842
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Api	23	11	23
Pencurian dengan Kekerasan			
Menggunakan Senjata Tajam	72	71	66
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang			
Pencurian	2.256	2.310	1.907
Pencurian dengan Pemberatan	3.771	3.912	3.982
Pencurian Kendaraan Bermotor	3.253	3.091	2.717
Pengrusakan/Penghancuran Barang	581	496	1.919
Pembakaran dengan Sengaja	56	41	29
Penadahan	43	102	63
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3.111	2.482	1.835
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1.738	1.810	1.500
Penggelapan	2.573	2.278	1.942
Korupsi	105	99	107
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	367	339	288

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 3.10.
Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2014

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		KDRT
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	21	372	1.129	352	
Sumatera Utara	94	3.083	3.254	-	
Sumatera Barat	12	650	1.813	371	
Riau	30	357	829	316	
Jambi	22	233	448	243	
Sumatera Selatan	224	1.455	573	601	
Bengkulu	30	279	26	161	
Lampung	34	120	-	85	
Bangka Belitung	11	160	12	70	
Kepulauan Riau	17	27	472	196	
Metro Jaya ¹⁾	72	1.961	363	1.199	
Jawa Barat	113	809	992	570	
Jawa Tengah	49	461	651	486	
DI Yogyakarta	8	71	352	157	
Jawa Timur	24	417	247	251	
Banten	9	165	342	60	
Bali	13	64	344	216	
Nusa Tenggara Barat	22	110	-	309	
Nusa Tenggara Timur	54	507	1.551	498	
Kalimantan Barat	26	150	-	242	
Kalimantan Tengah	30	40	187	25	
Kalimantan Selatan	51	250	226	87	
Kalimantan Timur	27	444	475	214	
Sulawesi Utara	46	403	174	367	
Sulawesi Tengah	18	40	1.489	381	
Sulawesi Selatan ²⁾	81	248	3.118	645	
Sulawesi Tenggara	27	53	1.156	355	
Gorontalo	9	150	1.085	205	
Maluku	6	133	424	149	
Maluku Utara	7	191	44	37	
Papua ²⁾	90	593	1.208	538	
INDONESIA	1.277	13.996	22.984	9.386	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.11.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan Perkosaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan Penculikan		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
A c e h	55	133	53	9	
Sumatera Utara	240	-	37	135	
Sumatera Barat	44	306	4	65	
Riau	277	-	10	5	
Jambi	73	7	2	11	
Sumatera Selatan	114	87	32	91	
Bengkulu	21	58	1	1	
Lampung	60	356	11	-	
Bangka Belitung	4	31	-	7	
Kepulauan Riau	15	109	6	12	
Metro Jaya ¹⁾	70	127	34	-	
Jawa Barat	79	238	37	141	
Jawa Tengah	31	363	16	328	
DI Yogyakarta	9	50	3	58	
Jawa Timur	35	126	13	86	
Banten	10	86	3	102	
Bali	9	26	2	25	
Nusa Tenggara Barat	41	-	3	15	
Nusa Tenggara Timur	69	178	6	17	
Kalimantan Barat	29	136	1	97	
Kalimantan Tengah	17	83	-	6	
Kalimantan Selatan	44	-	-	-	
Kalimantan Timur	24	196	3	-	
Sulawesi Utara	47	287	11	1	
Sulawesi Tengah	35	211	7	-	
Sulawesi Selatan ²⁾	124	220	20	7	
Sulawesi Tenggara	41	104	1	13	
Gorontalo	23	124	1	24	
Maluku	24	43	9	60	
Maluku Utara	7	37	1	23	
Papua ²⁾	44	62	9	279	
INDONESIA	1.715	3.784	336	1.618	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.11.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	154	2	5
Sumatera Utara	1.198	9	-
Sumatera Barat	430	-	7
Riau	390	31	32
Jambi	233	1	-
Sumatera Selatan	1.944	93	175
Bengkulu	171	2	1
Lampung	443	46	-
Bangka Belitung	45	1	2
Kepulauan Riau	250	1	12
Metro Jaya ¹⁾	944	50	261
Jawa Barat	1.136	40	21
Jawa Tengah	285	11	52
DI Yogyakarta	206	7	3
Jawa Timur	223	8	11
Banten	191	2	6
Bali	62	1	19
Nusa Tenggara Barat	278	6	-
Nusa Tenggara Timur	87	1	2
Kalimantan Barat	227	5	-
Kalimantan Tengah	69	4	88
Kalimantan Selatan	132	6	151
Kalimantan Timur	212	2	94
Sulawesi Utara	32	-	2
Sulawesi Tengah	207	2	7
Sulawesi Selatan ²⁾	442	1	56
Sulawesi Tenggara	71	-	4
Gorontalo	-	-	-
Maluku	10	-	-
Maluku Utara	9	-	1
Papua ²⁾	333	-	-
INDONESIA	10.414	332	1.012

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.11.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	1.159	498	1.425	18
Sumatera Utara	2.277	6.613	6.078	40
Sumatera Barat	1.340	3.061	3.115	2
Riau	800	1.632	1.378	19
Jambi	537	1.540	1.165	1
Sumatera Selatan	801	4.599	2.670	11
Bengkulu	213	614	361	8
Lampung	110	1.249	25	2
Bangka Belitung	160	366	123	2
Kepulauan Riau	760	271	853	4
Metro Jaya ¹⁾	1.575	3.712	4.190	77
Jawa Barat	1.051	4.666	5.563	36
Jawa Tengah	1.041	2.360	2.057	32
DI Yogyakarta	576	719	585	1
Jawa Timur	597	979	1.264	26
Banten	206	1.326	1.375	10
Bali	459	521	500	4
Nusa Tenggara Barat	484	873	-	4
Nusa Tenggara Timur	969	284	236	1
Kalimantan Barat	1.254	1.048	1.115	7
Kalimantan Tengah	171	426	343	4
Kalimantan Selatan	348	673	768	17
Kalimantan Timur	747	1.402	1.432	7
Sulawesi Utara	619	103	316	2
Sulawesi Tengah	1.470	714	929	4
Sulawesi Selatan ²⁾	2.078	928	2.293	5
Sulawesi Tenggara	847	231	553	2
Gorontalo	635	29	129	-
Maluku	368	16	139	1
Maluku Utara	126	31	76	-
Papua ²⁾	760	1.215	1.109	7
INDONESIA	24.538	42.699	42.165	354

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.11.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika Narkotika dan Psikotropika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	163	60	688
Sumatera Utara	969	142	2.732
Sumatera Barat	705	30	305
Riau	195	38	934
Jambi	139	18	270
Sumatera Selatan	437	41	1.207
Bengkulu	48	13	136
Lampung	26	1	1.669
Bangka Belitung	27	1	80
Kepulauan Riau	107	1	282
Metro Jaya ¹⁾	318	10	4.712
Jawa Barat	295	9	830
Jawa Tengah	175	6	567
DI Yogyakarta	99	3	106
Jawa Timur	98	9	499
Banten	36	2	135
Bali	93	1	369
Nusa Tenggara Barat	217	14	171
Nusa Tenggara Timur	412	72	5
Kalimantan Barat	161	23	231
Kalimantan Tengah	28	121	274
Kalimantan Selatan	32	-	1.091
Kalimantan Timur	146	18	908
Sulawesi Utara	357	11	4
Sulawesi Tengah	287	17	206
Sulawesi Selatan ²⁾	604	28	713
Sulawesi Tenggara	271	8	55
Gorontalo	199	38	5
Maluku	98	18	24
Maluku Utara	22	2	39
Papua ²⁾	443	33	33
INDONESIA	7.207	788	19.280

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.11.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	562	489	56	6
Sumatera Utara	1.680	2.823	28	2
Sumatera Barat	1.122	1.075	10	312
Riau	539	907	23	1
Jambi	671	750	8	252
Sumatera Selatan	1.517	1.555	14	281
Bengkulu	319	274	19	19
Lampung	105	375	-	42
Bangka Belitung	125	110	5	3
Kepulauan Riau	404	368	20	-
Metro Jaya ¹⁾	5.656	2.610	99	312
Jawa Barat	3.251	1.524	78	473
Jawa Tengah	1.649	1.494	67	170
DI Yogyakarta	755	392	11	92
Jawa Timur	995	542	19	142
Banten	639	256	28	26
Bali	236	335	13	7
Nusa Tenggara Barat	334	274	9	3
Nusa Tenggara Timur	336	281	11	944
Kalimantan Barat	460	751	56	-
Kalimantan Tengah	83	233	22	-
Kalimantan Selatan	256	365	21	-
Kalimantan Timur	534	706	26	-
Sulawesi Utara	570	450	31	15
Sulawesi Tengah	629	513	15	15
Sulawesi Selatan ²⁾	1.436	901	47	1
Sulawesi Tenggara	471	284	20	5
Gorontalo	415	373	4	60
Maluku	117	79	3	357
Maluku Utara	43	48	2	-
Papua ²⁾	481	267	49	979
INDONESIA	26.390	21.404	814	4.519

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 3.11.
Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2015

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan		Penganiayaan	Penganiayaan Ringan	KDRT
			Berat		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A c e h	40		217	1.418	440
Sumatera Utara	118		2.953	2.629	-
Sumatera Barat	18		498	2.523	325
Riau	49		242	826	318
Jambi	23		479	438	250
Sumatera Selatan	161		1.558	526	650
Bengkulu	19		221	30	129
Lampung	29		124	94	148
Bangka Belitung	11		93	9	62
Kepulauan Riau	17		192	497	200
Metro Jaya ¹⁾	75		1.848	93	1.027
Jawa Barat	74		837	897	591
Jawa Tengah	48		444	677	408
DI Yogyakarta	9		76	200	136
Jawa Timur	62		703	524	440
Banten	2		91	367	65
Bali	15		4	353	223
Nusa Tenggara Barat	44		103	-	320
Nusa Tenggara Timur	80		807	1.461	412
Kalimantan Barat	14		42	-	220
Kalimantan Tengah	29		46	178	52
Kalimantan Selatan	59		323	196	103
Kalimantan Timur	43		499	421	248
Sulawesi Utara	104		866	249	254
Sulawesi Tengah	49		73	1.594	395
Sulawesi Selatan ²⁾	102		201	3.555	1.051
Sulawesi Tenggara	58		9	613	138
Gorontalo	27		133	1.064	193
Maluku	12		90	459	135
Maluku Utara	4		176	-	33
Papua Barat	1		105	146	55
Papua	95		611	944	462
INDONESIA	1.491		14.664	22.981	9.483

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	61	174	38	26
Sumatera Utara	154	-	24	81
Sumatera Barat	67	302	3	124
Riau	284	-	3	1
Jambi	81	14	4	19
Sumatera Selatan	111	153	48	145
Bengkulu	13	44	-	-
Lampung	32	40	6	-
Bangka Belitung	6	41	2	46
Kepulauan Riau	36	131	7	1
Metro Jaya ¹⁾	61	180	56	-
Jawa Barat	102	178	33	103
Jawa Tengah	41	234	6	359
DI Yogyakarta	19	24	7	38
Jawa Timur	91	167	37	127
Banten	7	60	2	129
Bali	11	39	3	8
Nusa Tenggara Barat	46	-	12	34
Nusa Tenggara Timur	50	177	9	48
Kalimantan Barat	18	130	-	75
Kalimantan Tengah	21	112	-	20
Kalimantan Selatan	49	13	8	15
Kalimantan Timur	26	189	4	-
Sulawesi Utara	37	253	16	-
Sulawesi Tengah	33	181	21	-
Sulawesi Selatan ²⁾	95	211	13	-
Sulawesi Tenggara	56	52	2	18
Gorontalo	20	82	3	15
Maluku	20	43	10	54
Maluku Utara	13	43	-	17
Papua Barat	8	4	1	50
Papua	70	41	2	279
INDONESIA	1.739	3.312	380	1.832

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38	3	8
Sumatera Utara	1.587	4	-
Sumatera Barat	506	-	14
Riau	454	47	2
Jambi	382	5	-
Sumatera Selatan	1.776	55	82
Bengkulu	291	5	3
Lampung	759	73	9
Bangka Belitung	20	3	4
Kepulauan Riau	133	1	14
Metro Jaya ¹⁾	692	44	149
Jawa Barat	853	39	34
Jawa Tengah	365	5	78
DI Yogyakarta	215	-	-
Jawa Timur	747	6	12
Banten	117	2	2
Bali	43	1	19
Nusa Tenggara Barat	163	5	-
Nusa Tenggara Timur	44	-	1
Kalimantan Barat	190	3	1
Kalimantan Tengah	38	1	115
Kalimantan Selatan	132	1	-
Kalimantan Timur	141	4	109
Sulawesi Utara	24	1	1
Sulawesi Tengah	237	1	1
Sulawesi Selatan ²⁾	422	2	125
Sulawesi Tenggara	110	-	-
Gorontalo	3	-	2
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	2	-	-
Papua Barat	79	1	-
Papua	196	-	-
INDONESIA	10.759	312	80

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang				
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	1.732	188	1.661	32	
Sumatera Utara	2.004	5.709	4.934	43	
Sumatera Barat	1.531	3.118	2.977	7	
Riau	765	1.641	1.046	24	
Jambi	752	2.188	1.406	-	
Sumatera Selatan	668	3.895	1.723	5	
Bengkulu	314	781	417	1	
Lampung	280	2.142	276	2	
Bangka Belitung	208	327	144	-	
Kepulauan Riau	815	245	915	10	
Metro Jaya ¹⁾	1.823	3.547	3.169	63	
Jawa Barat	1.444	3.125	5.063	38	
Jawa Tengah	1.041	2.860	2.053	39	
DI Yogyakarta	821	704	569	16	
Jawa Timur	901	3.707	1.273	45	
Banten	219	1.006	988	12	
Bali	378	406	400	5	
Nusa Tenggara Barat	525	472	-	14	
Nusa Tenggara Timur	808	216	247	79	
Kalimantan Barat	974	702	821	8	
Kalimantan Tengah	148	304	345	16	
Kalimantan Selatan	375	597	569	21	
Kalimantan Timur	832	969	1.481	13	
Sulawesi Utara	625	72	202	8	
Sulawesi Tengah	1.279	698	1.091	4	
Sulawesi Selatan ²⁾	2.306	686	2.489	11	
Sulawesi Tenggara	474	202	289	4	
Gorontalo	678	30	154	1	
Maluku	399	8	93	1	
Maluku Utara	83	10	22	2	
Papua Barat	193	230	35	4	
Papua	903	315	1.537	9	
INDONESIA	26.298	41.100	38.389	537	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika Narkotika dan Psikotropika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	61	54	948
Sumatera Utara	1.012	78	4.711
Sumatera Barat	701	19	974
Riau	241	30	1.294
Jambi	205	21	371
Sumatera Selatan	320	63	1.443
Bengkulu	76	3	263
Lampung	126	3	1.257
Bangka Belitung	18	9	203
Kepulauan Riau	110	2	420
Metro Jaya ¹⁾	256	12	5.860
Jawa Barat	306	8	1.729
Jawa Tengah	111	20	1.350
DI Yogyakarta	107	3	466
Jawa Timur	344	30	8.021
Banten	47	-	234
Bali	52	2	981
Nusa Tenggara Barat	141	17	214
Nusa Tenggara Timur	302	44	24
Kalimantan Barat	94	32	379
Kalimantan Tengah	19	77	291
Kalimantan Selatan	26	20	1.899
Kalimantan Timur	86	26	1.059
Sulawesi Utara	465	11	872
Sulawesi Tengah	440	25	249
Sulawesi Selatan ²⁾	540	43	977
Sulawesi Tenggara	274	5	158
Gorontalo	200	26	11
Maluku	14	22	21
Maluku Utara	8	-	46
Papua Barat	47	-	9
Papua	219	16	140
INDONESIA	6.968	721	36.874

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	417	444	50	4
Sumatera Utara	2.881	2.059	83	-
Sumatera Barat	1.279	1.379	84	300
Riau	819	389	59	9
Jambi	1.047	988	48	371
Sumatera Selatan	1.490	1.381	68	286
Bengkulu	356	355	33	14
Lampung	658	722	34	11
Bangka Belitung	68	78	24	-
Kepulauan Riau	294	351	22	-
Metro Jaya ¹⁾	2.595	5.823	69	331
Jawa Barat	1.247	3.608	78	462
Jawa Tengah	1.351	1.353	94	172
DI Yogyakarta	548	1.404	25	97
Jawa Timur	1.731	4.197	171	94
Banten	172	587	31	19
Bali	268	229	49	7
Nusa Tenggara Barat	181	194	45	4
Nusa Tenggara Timur	247	403	60	877
Kalimantan Barat	576	319	68	-
Kalimantan Tengah	142	64	48	-
Kalimantan Selatan	247	153	52	8
Kalimantan Timur	530	398	94	5
Sulawesi Utara	452	735	40	8
Sulawesi Tengah	647	785	24	14
Sulawesi Selatan ²⁾	724	1.229	113	2
Sulawesi Tenggara	218	399	49	1
Gorontalo	280	350	29	8
Maluku	10	21	15	294
Maluku Utara	20	16	22	-
Papua Barat	58	91	5	175
Papua	93	185	94	654
INDONESIA	21.646	30.689	1.780	4.227

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Tabel 3.12.
Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, Tahun 2016

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Berat	Penganiayaan	Penganiayaan	KDRT
			(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A c e h	43	233	1.320	450	
Sumatera Utara	161	2.959	2.743	-	
Sumatera Barat	21	435	1.911	387	
Riau	20	172	661	366	
Jambi	27	387	519	237	
Sumatera Selatan	132	1.575	377	576	
Bengkulu	18	307	88	215	
Lampung	56	146	37	241	
Bangka Belitung	10	43	2	46	
Kepulauan Riau	8	243	371	196	
Metro Jaya ¹⁾	69	1.601	404	1.324	
Jawa Barat	113	753	1.032	686	
Jawa Tengah	33	310	513	258	
DI Yogyakarta	6	120	169	158	
Jawa Timur	49	688	496	491	
Banten	3	121	343	70	
Bali	13	5	398	186	
Nusa Tenggara Barat	22	33	-	454	
Nusa Tenggara Timur	44	959	1.250	456	
Kalimantan Barat	20	109	-	193	
Kalimantan Tengah	33	28	191	52	
Kalimantan Selatan	41	275	115	71	
Kalimantan Timur	23	470	319	341	
Sulawesi Utara	128	993	276	789	
Sulawesi Tengah	25	52	1.803	540	
Sulawesi Selatan ²⁾	81	211	2.725	1.019	
Sulawesi Tenggara	10	9	836	204	
Gorontalo	12	70	950	245	
Maluku	9	71	383	138	
Maluku Utara	23	167	-	52	
Papua ²⁾	25	670	512	492	
INDONESIA	1.292	14.468	21.155	11.083	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusastraan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	40	251	18	42
Sumatera Utara	186	-	79	133
Sumatera Barat	54	286	2	146
Riau	173	-	2	1
Jambi	93	18	3	79
Sumatera Selatan	115	96	17	166
Bengkulu	27	92	1	-
Lampung	80	18	24	-
Bangka Belitung	10	46	1	34
Kepulauan Riau	10	122	1	-
Metro Jaya ¹⁾	70	210	67	99
Jawa Barat	89	233	44	126
Jawa Tengah	15	259	4	314
DI Yogyakarta	3	53	14	45
Jawa Timur	56	195	17	151
Banten	8	70	1	123
Bali	27	66	2	29
Nusa Tenggara Barat	39	-	7	78
Nusa Tenggara Timur	55	143	5	16
Kalimantan Barat	27	120	1	155
Kalimantan Tengah	7	96	-	3
Kalimantan Selatan	59	-	-	-
Kalimantan Timur	31	199	3	9
Sulawesi Utara	41	285	17	1
Sulawesi Tengah	54	162	6	37
Sulawesi Selatan ²⁾	60	243	10	182
Sulawesi Tenggara	40	94	-	93
Gorontalo	22	127	-	42
Maluku	15	48	17	96
Maluku Utara	18	64	2	15
Papua ²⁾	49	37	2	149
INDONESIA	1.594	3.653	374	2.511

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	179	3	9
Sumatera Utara	1.153	7	-
Sumatera Barat	512	1	19
Riau	348	33	10
Jambi	368	7	-
Sumatera Selatan	1.406	37	83
Bengkulu	214	4	13
Lampung	720	27	14
Bangka Belitung	31	1	3
Kepulauan Riau	166	1	3
Metro Jaya ¹⁾	743	53	188
Jawa Barat	1.107	59	23
Jawa Tengah	247	1	45
DI Yogyakarta	171	1	-
Jawa Timur	406	3	17
Banten	139	4	-
Bali	41	-	14
Nusa Tenggara Barat	393	6	-
Nusa Tenggara Timur	89	1	1
Kalimantan Barat	305	1	-
Kalimantan Tengah	38	1	75
Kalimantan Selatan	105	4	355
Kalimantan Timur	133	5	122
Sulawesi Utara	28	-	3
Sulawesi Tengah	336	5	1
Sulawesi Selatan ²⁾	646	1	85
Sulawesi Tenggara	43	1	11
Gorontalo	14	2	-
Maluku	16	-	-
Maluku Utara	4	-	1
Papua ²⁾	363	3	-
INDONESIA	10.726	272	1.097

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang				
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	1.568	481	1.688	38	
Sumatera Utara	2.145	5.630	4.726	56	
Sumatera Barat	1.632	3.034	2.975	7	
Riau	662	1.584	704	25	
Jambi	755	1.750	1.156	-	
Sumatera Selatan	566	3.742	1.348	18	
Bengkulu	560	1.082	725	18	
Lampung	400	1.805	101	6	
Bangka Belitung	189	671	135	3	
Kepulauan Riau	864	501	542	7	
Metro Jaya ¹⁾	1.642	3.302	2.941	109	
Jawa Barat	1.059	3.652	5.234	29	
Jawa Tengah	867	2.713	1.796	25	
DI Yogyakarta	628	795	563	6	
Jawa Timur	854	3.971	1.897	102	
Banten	200	757	836	10	
Bali	501	557	479	5	
Nusa Tenggara Barat	638	945	-	18	
Nusa Tenggara Timur	908	524	329	60	
Kalimantan Barat	997	992	957	11	
Kalimantan Tengah	184	693	329	18	
Kalimantan Selatan	299	685	447	4	
Kalimantan Timur	627	1.179	1.402	10	
Sulawesi Utara	765	418	218	27	
Sulawesi Tengah	2.100	663	1.581	1	
Sulawesi Selatan ²⁾	2.194	1.239	2.083	6	
Sulawesi Tenggara	618	566	384	14	
Gorontalo	697	287	161	-	
Maluku	297	550	154	-	
Maluku Utara	69	281	20	-	
Papua ²⁾	745	989	1.730	22	
INDONESIA	26.636	46.277	37.871	666	

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

² Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	188	50	1.402
Sumatera Utara	804	165	5.591
Sumatera Barat	540	23	724
Riau	122	32	1.451
Jambi	163	15	462
Sumatera Selatan	1.724	34	1.640
Bengkulu	54	-	262
Lampung	131	-	949
Bangka Belitung	32	2	172
Kepulauan Riau	111	-	475
Metro Jaya ¹⁾	253	7	5.569
Jawa Barat	241	12	2.446
Jawa Tengah	92	9	1.774
DI Yogyakarta	116	4	427
Jawa Timur	151	19	7.523
Banten	28	2	399
Bali	71	10	856
Nusa Tenggara Barat	227	10	341
Nusa Tenggara Timur	334	50	32
Kalimantan Barat	87	3	529
Kalimantan Tengah	16	36	857
Kalimantan Selatan	25	-	1.916
Kalimantan Timur	88	14	1.457
Sulawesi Utara	427	31	1.344
Sulawesi Tengah	295	8	209
Sulawesi Selatan ²⁾	515	30	62
Sulawesi Tenggara	139	10	50
Gorontalo	188	28	26
Maluku	79	18	24
Maluku Utara	18	-	27
Papua ²⁾	553	22	164
INDONESIA	7.926	650	39.171

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Lanjutan Tabel 3.12.

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	675	648	55	3
Sumatera Utara	2.068	3.009	56	2
Sumatera Barat	1.077	980	30	375
Riau	418	654	45	-
Jambi	896	866	28	351
Sumatera Selatan	1.296	1.493	39	300
Bengkulu	441	379	44	24
Lampung	797	779	38	-
Bangka Belitung	115	96	15	-
Kepulauan Riau	420	371	26	-
Metro Jaya ¹⁾	5.969	2.432	52	313
Jawa Barat	3.123	1.475	70	407
Jawa Tengah	1.090	1.022	60	275
DI Yogyakarta	881	417	19	91
Jawa Timur	1.693	666	112	55
Banten	422	190	25	3
Bali	178	267	32	2
Nusa Tenggara Barat	311	277	28	-
Nusa Tenggara Timur	324	223	39	926
Kalimantan Barat	282	590	43	4
Kalimantan Tengah	81	166	45	4
Kalimantan Selatan	207	273	35	-
Kalimantan Timur	384	686	58	4
Sulawesi Utara	689	383	27	7
Sulawesi Tengah	617	564	27	3
Sulawesi Selatan ²⁾	1.574	760	61	-
Sulawesi Tenggara	207	121	36	-
Gorontalo	436	290	26	7
Maluku	123	71	24	243
Maluku Utara	36	16	35	-
Papua ²⁾	353	188	68	523
INDONESIA	27.421	20.459	1.318	4.297

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan : ¹⁾ Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3

²⁾ Meliputi wilayah sebelum pemekaran provinsi. Polda Sulsel meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Polda Papua meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

3.4. Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayah

Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data Polri yang menggunakan pendekatan pelaku, kejadian kejahatan juga dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayah/regional (desa/kelurahan). Bagian ini akan melihat gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan. Data ini diperoleh dari Pendataan Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS tiap tiga tahun.

Selama periode 2008 – 2014, seperti yang disajikan pada Tabel 3.14, jenis kejadian kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36 - 45 persen dari seluruh desa. Persentase desa yang mengalami kejadian pencurian meningkat dari 2011 yang sekitar 28.912 desa/kelurahan (36,78 persen) menjadi 33.729 desa/kelurahan (41,05 persen) pada 2014. Selama tahun 2014 dari beberapa jenis kejahatan yang diukur menunjukkan enam jenis kejahatan yang mengalami peningkatan yakni jenis kejahatan pembunuhan, pencurian dengan kekerasan (perampokan), pencurian, penipuan/penggelapan, pembakaran dengan sengaja, penyalahgunaan/pengedaran narkoba, dan perjudian.

Kejadian kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia

Kejadian kejahatan yang paling menonjol pada rata-rata provinsi selama periode 2008-2011 adalah kejahatan pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan, dan penyalahgunaan/peredaran narkoba.

Peristiwa kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2008-2014 pada setiap provinsi secara umum mempunyai pola yang hampir serupa dengan pola secara nasional. Berdasarkan tabel 3.15 nampak bahwa dari sisi jumlah, lima provinsi yang jumlah desa/kelurahannya yang mengalami kejadian kejahatan pembunuhan terbanyak, berturut-turut adalah Jawa Timur (163), Jawa Barat (142), Sumatera Selatan (140), Sumatera Utara (130), dan Papua (112). Namun, apabila dilihat dari persentasenya (perbandingan jumlah desa/kelurahan yang

mengalami kejadian dibagi total jumlah desa/kelurahan di satu provinsi) maka Jakarta dan Sumatera Selatan merupakan provinsi yang persentasenya paling besar.

Berdasarkan Tabel 3.18, rentang persentase kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan pada 34 provinsi berkisar 0–10,51 persen pada tahun 2008, menjadi sebesar 0,9–13,1 persen pada tahun 2011, dan menjadi sebesar 0,4–27,3 persen pada tahun 2014. Pada 2011 dan 2014 provinsi yang persentase desa/kelurahan dengan kejadian penganiayaan paling tinggi adalah DKI Jakarta masing-masing sebesar 13,11 persen dan 24,7 persen.

Untuk kejadian pencurian seperti yang disajikan pada Tabel 3.19, rentang persentase desa/kelurahan yang mengalami pencurian selama tahun 2008 berada pada kisaran 9,3–75,9 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Rentang persentase kejadian tersebut pada tahun 2011 menurun menjadi sebesar 7,8–74,5 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 9,51–85,8 persen. Pada 2008, 2011, dan 2014 provinsi yang persentase desa/kelurahan dengan kejadian pencurian paling tinggi berturut-turut adalah Jawa Barat (75,9 persen), DKI Jakarta (74,5 persen), dan DKI Jakarta (85,8 persen). Dengan kata lain, pada 2014 lebih dari 80 persen desa/kelurahan di DKI Jakarta pernah mengalami kejadian pencurian.

Pada 2014 lebih dari 80 persen desa/kelurahan di DKI Jakarta pernah mengalami kejadian pencurian.

Perkembangan yang hampir serupa selama periode tahun 2008–2014 juga terjadi untuk kejahatan penganiayaan. Seperti yang disajikan pada Tabel 3.26, rentang persentase kejadian kejahatan penganiayaan pada 34 provinsi berkisar 1,6–16,7 persen pada tahun 2008, menurun menjadi sebesar 1,5–14,9 persen pada tahun 2011 dan meningkat menjadi sebesar 1,3–24,7 persen pada tahun 2014. Pada 2008, 2011, dan 2014 provinsi yang persentase desa/kelurahan dengan kejadian penganiayaan paling tinggi berturut-turut adalah NTB (16,7 persen), Kepulauan Bangka Belitung (14,9 persen), dan DKI Jakarta (24,7 persen).

Dari keseluruhan jenis kejahatan yang terjadi selama periode tahun 2008–2011 di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu jenis peristiwa yang mendapat perhatian khusus adalah kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Seperti yang disajikan pada Tabel 3.33, kejadiannya telah merebak di sejumlah desa/kelurahan pada semua provinsi di Indonesia, seperti halnya kejadian kejahatan pencurian dan penganiayaan. Cakupan kejadian kejahatan narkoba pada hampir keseluruhan provinsi selama periode tahun 2011–2014 nampak meningkat di lebih dari 75 persen provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Pada 2008, 2011, dan 2014 provinsi yang persentase desa/kelurahan dengan kejadian penyalahgunaan/peredaran narkoba paling tinggi adalah DKI Jakarta masing-masing sebesar 33,7; 22,7 persen, dan 47,2 persen.

DATA PODES (POTENSI DESA)

Tabel 3.13
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

No	Provinsi	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	A c e h	6.424	6.483	6.512
2	Sumatera Utara	5.767	5.797	6.104
3	Sumatera Barat	924	1.033	1.145
4	Riau	1.604	1.655	1.835
5	Jambi	1.303	1.372	1.551
6	Sumatera Selatan	3.079	3.186	3.237
7	Bengkulu	1.351	1.509	1.532
8	Lampung	2.339	2.464	2.632
9	Kepulauan Bangka Belitung	344	361	381
10	Kepulauan Riau	326	353	415
11	DKI. Jakarta	267	267	267
12	Jawa Barat	5.871	5.905	5.962
13	Jawa Tengah	8.574	8.577	8.578
14	DI.Yogyakarta	438	438	438
15	Jawa Timur	8.505	8.502	8.502
16	Banten	1.504	1.535	1.551
17	Bali	712	716	716
18	Nusa Tenggara Barat	913	1.084	1.141
19	Nusa Tenggara Timur	2.803	2.966	3.270
20	Kalimantan Barat	1.791	1.967	2.109
21	Kalimantan Tengah	1.448	1.528	1.569
22	Kalimantan Selatan	1.974	2.000	2.008
23	Kalimantan Timur	1.417	1.465	1.026
24	Kalimantan Utara*	-	-	479
25	Sulawesi Utara	1.494	1.693	1.836
26	Sulawesi Tengah	1.686	1.815	1.986
27	Sulawesi Selatan	2.946	2.982	3.030
28	Sulawesi Tenggara	2.028	2.121	2.272
29	Gorontalo	584	731	736
30	Sulawesi Barat	536	638	648
31	Maluku	906	1.024	1.088
32	Maluku Utara	1.036	1.079	1.196
33	Papua Barat	1.205	1.439	1.567
34	Papua	3.311	3.924	4.871
INDONESIA		75.410	78.609	82.190

Catatan: ¹ Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Tabel 3.14
Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir
Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Jenis Kejahatan	Jumlah			Percentase		
	2008	2011	2014	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembunuhan	1.847	1.585	1.739	2,45	2,02	2,12
Penganiayaan	5.081	4.171	4.047	6,74	5,31	4,92
Perkosaan	2.200	2.122	2.050	2,92	2,70	2,49
Pencurian dengan Kekerasan	2.617	2.330	2.963	3,47	2,96	3,61
Pencurian	33.687	28.912	33.739	44,69	36,78	41,05
Penipuan/Penggelapan*	-	5.603	7.244	-	7,13	8,81
Pembakaran	672	518	874	0,89	0,66	1,06
Perdagangan Orang	121	119	122	0,16	0,15	0,15
Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	4.546	4.103	5.931	8,82	5,22	7,22
Perjudian*	-	7.984	11.079	-	10,16	13,48

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Pada tahun 2008 tidak ditanyakan jenis kejahatan Penipuan/Penggelapan dan Perjudian.

Tabel 3.15.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	30	30	26
Sumatera Utara	148	118	130
Sumatera Barat	42	29	39
Riau	65	57	56
Jambi	36	26	30
Sumatera Selatan	122	98	140
Bengkulu	30	24	27
Lampung	75	59	50
Kepulauan Bangka Belitung	15	19	14
Kepulauan Riau	17	14	14
DKI. Jakarta	16	17	29
Jawa Barat	161	124	142
Jawa Tengah	98	103	86
DI.Yogyakarta	14	7	16
Jawa Timur	182	138	163
Banten	38	31	32
Bali	14	11	17
Nusa Tenggara Barat	35	32	37
Nusa Tenggara Timur	80	93	80
Kalimantan Barat	21	39	41
Kalimantan Tengah	44	27	51
Kalimantan Selatan	72	57	64
Kalimantan Timur	44	32	31
Kalimantan Utara*	-	-	8
Sulawesi Utara	43	47	61
Sulawesi Tengah	30	34	41
Sulawesi Selatan	113	87	99
Sulawesi Tenggara	36	31	26
Gorontalo	8	16	17
Sulawesi Barat	17	13	8
Maluku	21	25	17
Maluku Utara	10	11	13
Papua Barat	21	18	22
Papua	149	118	112
INDONESIA	1.847	1.585	1.739

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.16.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011,dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	101	97	99
Sumatera Utara	344	267	264
Sumatera Barat	92	79	107
Riau	98	58	74
Jambi	51	49	50
Sumatera Selatan	153	169	168
Bengkulu	55	59	46
Lampung	133	116	110
Kepulauan Bangka Belitung	52	54	50
Kepulauan Riau	25	16	20
DKI. Jakarta	18	22	66
Jawa Barat	545	452	425
Jawa Tengah	452	321	274
DI.Yogyakarta	46	57	54
Jawa Timur	516	439	429
Banten	129	100	84
Bali	60	47	54
Nusa Tenggara Barat	152	131	107
Nusa Tenggara Timur	276	239	166
Kalimantan Barat	68	56	85
Kalimantan Tengah	99	59	68
Kalimantan Selatan	104	95	110
Kalimantan Timur	79	52	52
Kalimantan Utara*	-	-	11
Sulawesi Utara	211	201	161
Sulawesi Tengah	142	100	102
Sulawesi Selatan	334	261	261
Sulawesi Tenggara	150	118	158
Gorontalo	79	73	64
Sulawesi Barat	24	22	17
Maluku	71	64	50
Maluku Utara	35	26	48
Papua Barat	59	41	21
Papua	328	231	192
INDONESIA	5.081	4.171	4.047

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.17.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	43	57	91
Sumatera Utara	135	131	115
Sumatera Barat	49	60	66
Riau	65	44	59
Jambi	27	27	35
Sumatera Selatan	48	66	78
Bengkulu	32	47	57
Lampung	65	63	57
Kepulauan Bangka Belitung	14	25	16
Kepulauan Riau	15	15	19
DKI. Jakarta	6	4	25
Jawa Barat	177	208	175
Jawa Tengah	136	187	148
DI.Yogyakarta	8	22	11
Jawa Timur	209	257	215
Banten	41	30	39
Bali	10	12	9
Nusa Tenggara Barat	63	39	39
Nusa Tenggara Timur	105	113	104
Kalimantan Barat	45	48	63
Kalimantan Tengah	34	29	32
Kalimantan Selatan	28	25	25
Kalimantan Timur	42	40	23
Kalimantan Utara*	-	-	9
Sulawesi Utara	45	73	54
Sulawesi Tengah	52	47	56
Sulawesi Selatan	52	42	47
Sulawesi Tenggara	24	26	40
Gorontalo	22	29	36
Sulawesi Barat	6	9	5
Maluku	26	37	27
Maluku Utara	20	38	26
Papua Barat	19	19	23
Papua	537	253	226
INDONESIA	2.200	2.122	2.050

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.18.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008 (1)	2011 (2)	2014 (3)
Aceh	140	63	47
Sumatera Utara	186	93	141
Sumatera Barat	57	55	71
Riau	149	79	101
Jambi	66	57	76
Sumatera Selatan	279	221	430
Bengkulu	38	33	40
Lampung	200	186	255
Kepulauan Bangka Belitung	24	16	15
Kepulauan Riau	21	13	17
DKI. Jakarta	28	35	73
Jawa Barat	297	287	344
Jawa Tengah	132	146	176
DI.Yogyakarta	7	28	20
Jawa Timur	269	290	419
Banten	78	54	49
Bali	8	13	23
Nusa Tenggara Barat	96	107	146
Nusa Tenggara Timur	61	54	67
Kalimantan Barat	39	33	37
Kalimantan Tengah	54	41	27
Kalimantan Selatan	117	85	73
Kalimantan Timur	55	25	37
Kalimantan Utara*	-	-	9
Sulawesi Utara	22	27	21
Sulawesi Tengah	21	24	23
Sulawesi Selatan	69	54	47
Sulawesi Tenggara	6	23	16
Gorontalo	3	4	3
Sulawesi Barat	23	7	7
Maluku	-	9	20
Maluku Utara	5	2	7
Papua Barat	3	13	13
Papua	64	153	113
INDONESIA	2.617	2.330	2.963

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.19.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	1.886	1.101	1.744
Sumatera Utara	2.022	1.713	2.116
Sumatera Barat	472	420	574
Riau	845	726	942
Jambi	588	534	661
Sumatera Selatan	1.755	1.473	1.939
Bengkulu	540	599	635
Lampung	1.405	1.402	1.621
Kepulauan Bangka Belitung	179	174	203
Kepulauan Riau	135	115	133
DKI. Jakarta	185	199	229
Jawa Barat	4.453	4.157	4.390
Jawa Tengah	4.382	3.628	4.064
DI.Yogyakarta	261	275	283
Jawa Timur	4.297	3.767	4.122
Banten	1.107	978	1.079
Bali	275	200	202
Nusa Tenggara Barat	620	641	782
Nusa Tenggara Timur	767	612	724
Kalimantan Barat	645	517	648
Kalimantan Tengah	491	374	409
Kalimantan Selatan	939	820	889
Kalimantan Timur	458	348	354
Kalimantan Utara*	-	-	62
Sulawesi Utara	659	554	676
Sulawesi Tengah	512	407	578
Sulawesi Selatan	1.160	1.110	1.206
Sulawesi Tenggara	478	361	489
Gorontalo	178	114	179
Sulawesi Barat	142	150	171
Maluku	209	148	225
Maluku Utara	216	176	297
Papua Barat	112	113	149
Papua	1.314	1.006	964
INDONESIA	33.687	28.912	33.739

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.20.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008*	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	-	147	229
Sumatera Utara	-	227	378
Sumatera Barat	-	84	138
Riau	-	123	204
Jambi	-	72	109
Sumatera Selatan	-	150	334
Bengkulu	-	74	77
Lampung	-	216	284
Kepulauan Bangka Belitung	-	77	62
Kepulauan Riau	-	25	39
DKI. Jakarta	-	30	100
Jawa Barat	-	925	1.111
Jawa Tengah	-	817	952
DI.Yogyakarta	-	112	96
Jawa Timur	-	766	1.001
Banten	-	228	227
Bali	-	37	42
Nusa Tenggara Barat	-	134	136
Nusa Tenggara Timur	-	86	163
Kalimantan Barat	-	84	141
Kalimantan Tengah	-	41	95
Kalimantan Selatan	-	126	150
Kalimantan Timur	-	58	84
Kalimantan Utara*	-		10
Sulawesi Utara	-	92	89
Sulawesi Tengah	-	95	107
Sulawesi Selatan	-	219	305
Sulawesi Tenggara	-	43	87
Gorontalo	-	31	35
Sulawesi Barat	-	27	27
Maluku	-	41	52
Maluku Utara	-	22	49
Papua Barat	-	26	37
Papua	-	368	294
INDONESIA	-	5.603	7.244

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

*: Pada 2008 tidak ditanyakan jenis kejadian kejahatan penipuan

Tabel 3.21.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31	16	48
Sumatera Utara	22	53	53
Sumatera Barat	7	24	18
Riau	38	17	78
Jambi	15	9	26
Sumatera Selatan	32	22	30
Bengkulu	10	12	15
Lampung	15	9	11
Kepulauan Bangka Belitung	3	8	6
Kepulauan Riau	6	4	10
DKI. Jakarta	5	6	10
Jawa Barat	48	26	54
Jawa Tengah	21	20	39
DI.Yogyakarta	-	-	5
Jawa Timur	57	27	68
Banten	3	5	13
Bali	5	2	7
Nusa Tenggara Barat	6	12	14
Nusa Tenggara Timur	139	56	98
Kalimantan Barat	9	14	23
Kalimantan Tengah	16	3	34
Kalimantan Selatan	10	13	18
Kalimantan Timur	10	8	11
Kalimantan Utara*	-	-	10
Sulawesi Utara	12	11	17
Sulawesi Tengah	5	15	21
Sulawesi Selatan	23	20	32
Sulawesi Tenggara	9	2	9
Gorontalo	2	3	5
Sulawesi Barat	4	2	6
Maluku	24	7	9
Maluku Utara	9	5	7
Papua Barat	7	5	8
Papua	69	82	61
INDONESIA	672	518	874

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.22.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008*	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2	1	2
Sumatera Utara	9	7	11
Sumatera Barat	3	-	-
Riau	5	6	2
Jambi	1	-	-
Sumatera Selatan	3	1	5
Bengkulu	-	1	2
Lampung	3	2	1
Kepulauan Bangka Belitung	-	2	2
Kepulauan Riau	3	4	2
DKI. Jakarta	-	-	2
Jawa Barat	21	33	25
Jawa Tengah	13	12	11
DI.Yogyakarta	1	1	-
Jawa Timur	17	16	11
Banten	1	1	2
Bali	-	-	1
Nusa Tenggara Barat	1	2	2
Nusa Tenggara Timur	2	7	14
Kalimantan Barat	11	3	7
Kalimantan Tengah	-	-	3
Kalimantan Selatan	-	1	-
Kalimantan Timur	4	3	-
Kalimantan Utara*	-	-	1
Sulawesi Utara	11	8	6
Sulawesi Tengah	-	-	1
Sulawesi Selatan	6	1	4
Sulawesi Tenggara	-	-	1
Gorontalo	-	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	1	1
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	2	-	-
Papua	2	6	2
INDONESIA	121	119	122

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.23.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	593	465	508
Sumatera Utara	623	543	1.033
Sumatera Barat	149	172	168
Riau	206	170	315
Jambi	110	67	167
Sumatera Selatan	272	220	409
Bengkulu	24	39	74
Lampung	126	124	186
Kepulauan Bangka Belitung	27	40	58
Kepulauan Riau	29	24	27
DKI. Jakarta	90	74	126
Jawa Barat	655	507	558
Jawa Tengah	187	246	263
DI.Yogyakarta	38	59	37
Jawa Timur	509	545	639
Banten	211	126	155
Bali	27	19	34
Nusa Tenggara Barat	52	50	93
Nusa Tenggara Timur	9	13	18
Kalimantan Barat	55	60	61
Kalimantan Tengah	37	38	81
Kalimantan Selatan	189	191	312
Kalimantan Timur	110	88	148
Kalimantan Utara*	-	-	32
Sulawesi Utara	5	9	25
Sulawesi Tengah	44	54	144
Sulawesi Selatan	97	84	128
Sulawesi Tenggara	8	8	25
Gorontalo	12	11	21
Sulawesi Barat	2	8	20
Maluku	13	16	15
Maluku Utara	17	12	21
Papua Barat	2	2	8
Papua	18	19	22
INDONESIA	4.546	4.103	5.931

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.24.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008*	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	-	242	401
Sumatera Utara	-	1.423	1.665
Sumatera Barat	-	239	267
Riau	-	236	329
Jambi	-	122	157
Sumatera Selatan	-	325	683
Bengkulu	-	52	67
Lampung	-	229	393
Kepulauan Bangka Belitung	-	57	71
Kepulauan Riau	-	21	31
DKI. Jakarta	-	34	83
Jawa Barat	-	498	692
Jawa Tengah	-	644	770
DI.Yogyakarta	-	70	59
Jawa Timur	-	1.227	1.502
Banten	-	169	180
Bali	-	154	81
Nusa Tenggara Barat	-	135	198
Nusa Tenggara Timur	-	176	293
Kalimantan Barat	-	210	303
Kalimantan Tengah	-	114	250
Kalimantan Selatan	-	209	283
Kalimantan Timur	-	112	129
Kalimantan Utara*	-	-	39
Sulawesi Utara	-	171	377
Sulawesi Tengah	-	240	337
Sulawesi Selatan	-	260	377
Sulawesi Tenggara	-	109	126
Gorontalo	-	60	116
Sulawesi Barat	-	36	95
Maluku	-	105	165
Maluku Utara	-	70	147
Papua Barat	-	32	57
Papua	-	203	356
INDONESIA	-	7.984	11.079

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Pada 2008 tidak ditanyakan jenis kejahatan perjudian

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.25.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008 (1)	2011 (2)	2014 (3)
A c e h	0,47	0,46	0,40
Sumatera Utara	2,57	2,04	2,13
Sumatera Barat	4,55	2,81	3,41
Riau	4,05	3,44	3,05
Jambi	2,76	1,90	1,93
Sumatera Selatan	3,96	3,08	4,32
Bengkulu	2,22	1,59	1,76
Lampung	3,21	2,39	1,90
Kepulauan Bangka Belitung	4,36	5,26	3,67
Kepulauan Riau	5,21	3,97	3,37
DKI. Jakarta	5,99	6,37	10,86
Jawa Barat	2,74	2,10	2,38
Jawa Tengah	1,14	1,20	1,00
DI.Yogyakarta	3,20	1,60	3,65
Jawa Timur	2,14	1,62	1,92
Banten	2,53	2,02	2,06
Bali	1,97	1,54	2,37
Nusa Tenggara Barat	3,83	2,95	3,24
Nusa Tenggara Timur	2,85	3,14	2,45
Kalimantan Barat	1,17	1,98	1,94
Kalimantan Tengah	3,04	1,77	3,25
Kalimantan Selatan	3,65	2,85	3,19
Kalimantan Timur	3,11	2,18	3,02
Kalimantan Utara*	-	-	1,67
Sulawesi Utara	2,88	2,78	3,32
Sulawesi Tengah	1,78	1,87	2,06
Sulawesi Selatan	3,84	2,92	3,27
Sulawesi Tenggara	1,78	1,46	1,14
Gorontalo	1,37	2,19	2,31
Sulawesi Barat	3,17	2,04	1,23
Maluku	2,32	2,44	1,56
Maluku Utara	0,97	1,02	1,09
Papua Barat	1,74	1,25	1,40
Papua	4,54	3,01	2,30
INDONESIA	2,45	2,02	2,12

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.26.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,57	1,50	1,52
Sumatera Utara	5,96	4,61	4,33
Sumatera Barat	9,96	7,65	9,34
Riau	6,11	3,50	4,03
Jambi	3,91	3,57	3,22
Sumatera Selatan	4,97	5,30	5,19
Bengkulu	4,07	3,91	3,00
Lampung	5,69	4,71	4,18
Kepulauan Bangka Belitung	15,12	14,96	13,12
Kepulauan Riau	7,67	4,53	4,82
DKI Jakarta	6,74	8,24	24,72
Jawa Barat	9,28	7,65	7,13
Jawa Tengah	5,27	3,74	3,19
DI Yogyakarta	10,50	13,01	12,33
Jawa Timur	6,07	5,16	5,05
Banten	8,58	6,51	5,42
Bali	8,43	6,56	7,54
Nusa Tenggara Barat	16,65	12,08	9,38
Nusa Tenggara Timur	9,85	8,06	5,08
Kalimantan Barat	3,80	2,85	4,03
Kalimantan Tengah	6,84	3,86	4,33
Kalimantan Selatan	5,27	4,75	5,48
Kalimantan Timur	5,58	3,55	5,07
Kalimantan Utara*	-	-	2,30
Sulawesi Utara	14,12	11,87	8,77
Sulawesi Tengah	8,42	5,51	5,14
Sulawesi Selatan	11,34	8,75	8,61
Sulawesi Tenggara	7,40	5,56	6,95
Gorontalo	13,53	9,99	8,70
Sulawesi Barat	4,48	3,45	2,62
Maluku	7,84	6,25	4,60
Maluku Utara	3,38	2,41	4,01
Papua Barat	4,90	2,85	1,34
Papua	10,00	5,89	3,94
INDONESIA	6,74	5,31	4,92

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.27.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,67	0,88	1,40
Sumatera Utara	2,34	2,26	1,88
Sumatera Barat	5,30	5,81	5,76
Riau	4,05	2,66	3,22
Jambi	2,07	1,97	2,26
Sumatera Selatan	1,56	2,07	2,41
Bengkulu	2,37	3,11	3,72
Lampung	2,78	2,56	2,17
Kepulauan Bangka Belitung	4,07	6,93	4,20
Kepulauan Riau	4,60	4,25	4,58
DKI. Jakarta	2,25	1,50	9,36
Jawa Barat	3,01	3,52	2,94
Jawa Tengah	1,59	2,18	1,73
DI.Yogyakarta	1,83	5,02	2,51
Jawa Timur	2,46	3,02	2,53
Banten	2,73	1,95	2,51
Bali	1,40	1,68	1,26
Nusa Tenggara Barat	6,90	3,60	3,42
Nusa Tenggara Timur	3,75	3,81	3,18
Kalimantan Barat	2,51	2,44	2,99
Kalimantan Tengah	2,35	1,90	2,04
Kalimantan Selatan	1,42	1,25	1,25
Kalimantan Timur	2,96	2,73	2,24
Kalimantan Utara*	-	-	1,88
Sulawesi Utara	3,01	4,31	2,94
Sulawesi Tengah	3,08	2,59	2,82
Sulawesi Selatan	1,77	1,41	1,55
Sulawesi Tenggara	1,18	1,23	1,76
Gorontalo	3,77	3,97	4,89
Sulawesi Barat	1,12	1,41	0,77
Maluku	2,87	3,61	2,48
Maluku Utara	1,93	3,52	2,17
Papua Barat	1,58	1,32	1,47
Papua	16,38	6,45	4,64
INDONESIA	2,92	2,70	2,49

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.28.

Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2,18	0,97	0,72
Sumatera Utara	3,23	1,60	2,31
Sumatera Barat	6,17	5,32	6,20
Riau	9,29	4,77	5,50
Jambi	5,07	4,15	4,90
Sumatera Selatan	9,06	6,94	13,28
Bengkulu	2,81	2,19	2,61
Lampung	8,55	7,55	9,69
Kepulauan Bangka Belitung	6,98	4,43	3,94
Kepulauan Riau	6,44	3,68	4,10
DKI. Jakarta	10,49	13,11	27,34
Jawa Barat	5,06	4,86	5,77
Jawa Tengah	1,54	1,70	2,05
DI.Yogyakarta	1,60	6,39	4,57
Jawa Timur	3,16	3,41	4,93
Banten	5,19	3,52	3,16
Bali	1,12	1,82	3,21
Nusa Tenggara Barat	10,51	9,87	12,80
Nusa Tenggara Timur	2,18	1,82	2,05
Kalimantan Barat	2,18	1,68	1,75
Kalimantan Tengah	3,73	2,68	1,72
Kalimantan Selatan	5,93	4,25	3,64
Kalimantan Timur	3,88	1,71	3,61
Kalimantan Utara*	-	-	1,88
Sulawesi Utara	1,47	1,59	1,14
Sulawesi Tengah	1,25	1,32	1,16
Sulawesi Selatan	2,34	1,81	1,55
Sulawesi Tenggara	0,30	1,08	0,70
Gorontalo	0,51	0,55	0,41
Sulawesi Barat	4,29	1,10	1,08
Maluku	0	0,88	1,84
Maluku Utara	0,48	0,19	0,59
Papua Barat	0,25	0,90	0,83
Papua	1,95	3,90	2,32
INDONESIA	3,47	2,96	3,61

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.29.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,36	16,98	26,78
Sumatera Utara	35,06	29,55	34,67
Sumatera Barat	51,08	40,66	50,13
Riau	52,68	43,87	51,34
Jambi	45,13	38,92	42,62
Sumatera Selatan	57,00	46,23	59,90
Bengkulu	39,97	39,70	41,45
Lampung	60,07	56,90	61,59
Kepulauan Bangka Belitung	52,03	48,20	53,28
Kepulauan Riau	41,41	32,58	32,05
DKI. Jakarta	69,29	74,53	85,77
Jawa Barat	75,85	70,40	73,63
Jawa Tengah	51,11	42,30	47,38
DI.Yogyakarta	59,59	62,79	64,61
Jawa Timur	50,52	44,31	48,48
Banten	73,60	63,71	69,57
Bali	38,62	27,93	28,21
Nusa Tenggara Barat	67,91	59,13	68,54
Nusa Tenggara Timur	27,36	20,63	22,14
Kalimantan Barat	36,01	26,28	30,73
Kalimantan Tengah	33,91	24,48	26,07
Kalimantan Selatan	47,57	41,00	44,27
Kalimantan Timur	32,32	23,75	34,50
Kalimantan Utara*	-	-	12,94
Sulawesi Utara	44,11	32,72	36,82
Sulawesi Tengah	30,37	22,42	29,10
Sulawesi Selatan	39,38	37,22	39,80
Sulawesi Tenggara	23,57	17,02	21,52
Gorontalo	30,48	15,60	24,32
Sulawesi Barat	26,49	23,51	26,39
Maluku	23,07	14,45	20,68
Maluku Utara	20,85	16,31	24,83
Papua Barat	9,29	7,85	9,51
Papua	40,07	25,64	19,79
INDONESIA	44,69	36,78	41,05

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.30.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008*	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	2,27	3,52
Sumatera Utara	-	3,92	6,19
Sumatera Barat	-	8,13	12,05
Riau	-	7,43	11,12
Jambi	-	5,25	7,03
Sumatera Selatan	-	4,71	10,32
Bengkulu	-	4,90	5,03
Lampung	-	8,77	10,79
Kepulauan Bangka Belitung	-	21,33	16,27
Kepulauan Riau	-	7,08	9,40
DKI Jakarta	-	11,24	37,45
Jawa Barat	-	15,66	18,63
Jawa Tengah	-	9,53	11,10
DI.Yogyakarta	-	25,57	21,92
Jawa Timur	-	9,01	11,77
Banten	-	14,85	14,64
Bali	-	5,17	5,87
Nusa Tenggara Barat	-	12,36	11,92
Nusa Tenggara Timur	-	2,90	4,98
Kalimantan Barat	-	4,27	6,69
Kalimantan Tengah	-	2,68	6,05
Kalimantan Selatan	-	6,30	7,47
Kalimantan Timur	-	3,96	8,19
Kalimantan Utara*	-	-	2,09
Sulawesi Utara	-	5,43	4,85
Sulawesi Tengah	-	5,23	5,39
Sulawesi Selatan	-	7,34	10,07
Sulawesi Tenggara	-	2,03	3,83
Gorontalo	-	4,24	4,76
Sulawesi Barat	-	4,23	4,17
Maluku	-	4,00	4,78
Maluku Utara	-	2,04	4,10
Papua Barat	-	1,81	2,36
Papua	-	9,38	6,04
INDONESIA	-	7,13	8,81

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

*: Pada 2008 tidak ditanyakan jenis kejadian kejahatan penipuan

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.31.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,48	0,25	0,74
Sumatera Utara	0,38	0,91	0,87
Sumatera Barat	0,76	2,32	1,57
Riau	2,37	1,03	4,25
Jambi	1,15	0,66	1,68
Sumatera Selatan	1,04	0,69	0,93
Bengkulu	0,74	0,80	0,98
Lampung	0,64	0,37	0,42
Kepulauan Bangka Belitung	0,87	2,22	1,57
Kepulauan Riau	1,84	1,13	2,41
DKI Jakarta	1,87	2,25	3,75
Jawa Barat	0,82	0,44	0,91
Jawa Tengah	0,24	0,23	0,45
DI.Yogyakarta	-	-	1,14
Jawa Timur	0,67	0,32	0,80
Banten	0,20	0,33	0,84
Bali	0,70	0,28	0,98
Nusa Tenggara Barat	0,66	1,11	1,23
Nusa Tenggara Timur	4,96	1,89	3,00
Kalimantan Barat	0,50	0,71	1,09
Kalimantan Tengah	1,10	0,20	2,17
Kalimantan Selatan	0,51	0,65	0,90
Kalimantan Timur	0,71	0,55	1,07
Kalimantan Utara*	-	-	2,09
Sulawesi Utara	0,80	0,65	0,93
Sulawesi Tengah	0,30	0,83	1,06
Sulawesi Selatan	0,78	0,67	1,06
Sulawesi Tenggara	0,44	0,09	0,40
Gorontalo	0,34	0,41	0,68
Sulawesi Barat	0,75	0,31	0,93
Maluku	2,65	0,68	0,83
Maluku Utara	0,87	0,46	0,59
Papua Barat	0,58	0,35	0,51
Papua	2,10	2,09	1,25
INDONESIA	0,89	0,66	1,06

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.32.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008 (1)	2011 (2)	2014 (4)
A c e h	0,03	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,16	0,12	0,18
Sumatera Barat	0,32	-	-
Riau	0,31	0,36	0,11
Jambi	0,08	-	-
Sumatera Selatan	0,10	0,03	0,15
Bengkulu	-	0,07	0,13
Lampung	0,13	0,08	0,04
Kepulauan Bangka Belitung	-	0,55	0,52
Kepulauan Riau	0,92	1,13	0,48
DKI Jakarta	-	-	0,75
Jawa Barat	0,36	0,56	0,42
Jawa Tengah	0,15	0,14	0,13
DI.Yogyakarta	0,23	0,23	-
Jawa Timur	0,20	0,19	0,13
Banten	0,07	0,07	0,13
Bali	-	-	0,14
Nusa Tenggara Barat	0,11	0,18	0,18
Nusa Tenggara Timur	0,07	0,24	0,43
Kalimantan Barat	0,61	0,15	0,33
Kalimantan Tengah	-	-	0,19
Kalimantan Selatan	-	0,05	-
Kalimantan Timur	0,28	0,20	-
Kalimantan Utara*	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,74	0,47	0,33
Sulawesi Tengah	-	-	0,05
Sulawesi Selatan	0,20	0,03	0,13
Sulawesi Tenggara	-	-	0,04
Gorontalo	-	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	0,10	0,09
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	0,17	-	-
Papua	0,06	0,15	0,04
INDONESIA	0,16	0,15	0,15

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.33.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008 (1)	2011 (2)	2014 (3)
A c e h	9,23	7,17	7,80
Sumatera Utara	10,80	9,37	16,92
Sumatera Barat	16,13	16,65	14,67
Riau	12,84	10,27	17,17
Jambi	8,44	4,88	10,77
Sumatera Selatan	8,83	6,91	12,64
Bengkulu	1,78	2,58	4,83
Lampung	5,39	5,03	7,07
Kepulauan Bangka Belitung	7,85	11,08	15,22
Kepulauan Riau	8,90	6,80	6,51
DKI Jakarta	33,71	27,72	47,19
Jawa Barat	11,16	8,59	9,36
Jawa Tengah	2,18	2,87	3,07
DI.Yogyakarta	8,68	13,47	8,45
Jawa Timur	5,98	6,41	7,52
Banten	14,03	8,21	9,99
Bali	3,79	2,65	4,75
Nusa Tenggara Barat	5,70	4,61	8,15
Nusa Tenggara Timur	0,32	0,44	0,55
Kalimantan Barat	3,07	3,05	2,89
Kalimantan Tengah	2,56	2,49	5,16
Kalimantan Selatan	9,57	9,55	15,54
Kalimantan Timur	7,76	6,01	14,42
Kalimantan Utara*	-	-	6,68
Sulawesi Utara	0,33	0,53	1,36
Sulawesi Tengah	2,61	2,98	7,25
Sulawesi Selatan	3,29	2,82	4,22
Sulawesi Tenggara	0,39	0,38	1,10
Gorontalo	2,05	1,50	2,85
Sulawesi Barat	0,37	1,25	3,09
Maluku	1,43	1,56	1,38
Maluku Utara	1,64	1,11	1,76
Papua Barat	0,17	0,14	0,51
Papua	0,55	0,48	0,45
INDONESIA	6,03	5,22	7,22

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

Tabel 3.34.
Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Tahun		
	2008*	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	3,73	6,16
Sumatera Utara	-	24,55	27,28
Sumatera Barat	-	23,14	23,32
Riau	-	14,26	17,93
Jambi	-	8,89	10,12
Sumatera Selatan	-	10,20	21,10
Bengkulu	-	3,45	4,37
Lampung	-	9,29	14,93
Kepulauan Bangka Belitung	-	15,79	18,64
Kepulauan Riau	-	5,95	7,47
DKI Jakarta	-	12,73	31,09
Jawa Barat	-	8,43	11,61
Jawa Tengah	-	7,51	8,98
DI.Yogyakarta	-	15,98	13,47
Jawa Timur	-	14,43	17,67
Banten	-	11,01	11,61
Bali	-	21,51	11,31
Nusa Tenggara Barat	-	12,45	17,35
Nusa Tenggara Timur	-	5,93	8,96
Kalimantan Barat	-	10,68	14,37
Kalimantan Tengah	-	7,46	15,93
Kalimantan Selatan	-	10,45	14,09
Kalimantan Timur	-	7,65	12,57
Kalimantan Utara*	-	10,10	8,14
Sulawesi Utara	-	-	20,53
Sulawesi Tengah	-	13,22	16,97
Sulawesi Selatan	-	8,72	12,44
Sulawesi Tenggara	-	5,14	5,55
Gorontalo	-	8,21	15,76
Sulawesi Barat	-	5,64	14,66
Maluku	-	10,25	15,17
Maluku Utara	-	6,49	12,29
Papua Barat	-	2,22	3,64
Papua	-	5,17	7,31
INDONESIA	-	10,16	13,48

Sumber : Statistik Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

* : Pada 2008 tidak ditanyakan jenis kejahatan perjudian

* : Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012

IV

KORBAN KEJAHATAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan, kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode tiga tahun terakhir. Data yang diperoleh berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas, yang dalam hal ini bisa disebut survei korban (*victimization survey's*), dirancang khusus untuk mencatat perkiraan viktimasasi yang ditunjukkan oleh sampel representatif populasi (Hagan, 1989)

Gambar 4.1.
Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Tahun 2014–2016

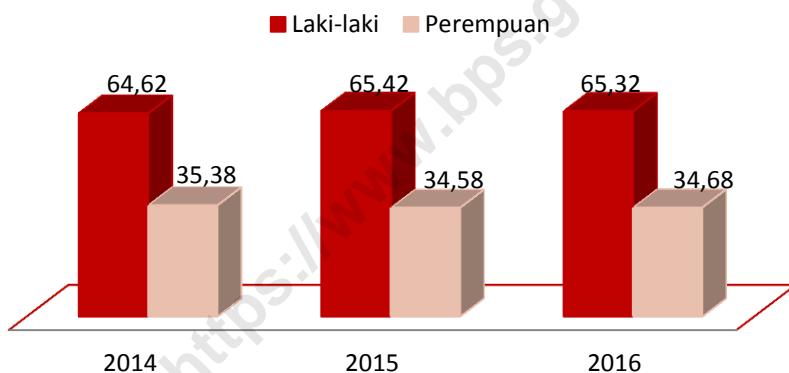


Gambar 4.1 menunjukkan pada tahun 2014, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,06 persen dari populasi penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menurun menjadi 1,00 persen pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan menjadi 0,93 persen.

Selama periode 2016 sekitar 0,93 persen dari total penduduk Indonesia mengalami tindak kejahatan

Dari 0,93 persen penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dapat dilihat polanya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin seperti yang disajikan pada Gambar 4.2, menunjukkan pada 2014-2016 mayoritas penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen.

**Gambar 4.2.
Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2014–2016**

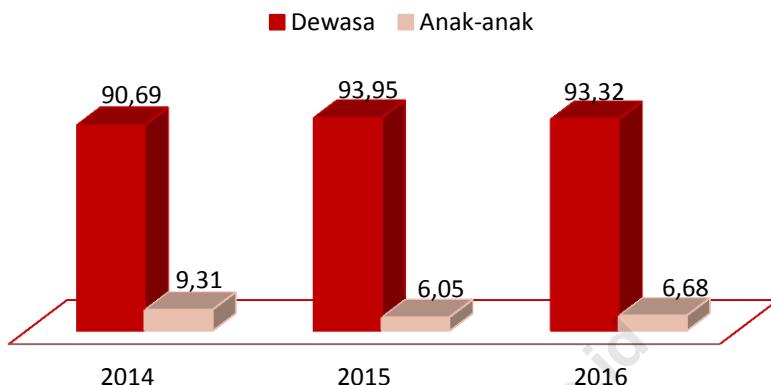


Ket: Populasi pada gambar ini adalah penduduk korban kejahatan yang terdapat pada gambar 4.1

Selama periode 2014-2016, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa perkembangan persentase penduduk korban kejahatan dari kelompok umur dewasa cenderung fluktuatif, yakni sebesar 90,69 persen pada 2014, meningkat menjadi 93,95 persen pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 93,32 persen.

Selama periode 2014-2016, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa dan laki-laki.

Gambar 4.3.
Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2014–2016



Ket: Populasi pada gambar ini adalah penduduk korban kejahatan yang terdapat pada gambar 4.1

Pada periode tahun 2015–2016, penduduk yang menjadi korban kejahatan persentasenya meningkat pada 12 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara (lihat Tabel 4.1).

Komposisi penduduk korban kejahatan selama periode tahun 2014–2016 pada setiap provinsi secara umum serupa dengan komposisi secara nasional. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di hampir semua provinsi lebih besar laki-laki daripada perempuan. Pada tahun 2016, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah provinsi Sumatera Barat (49,76 persen), provinsi Kepulauan Riau (49,74 persen) dan DKI Jakarta (42,31 persen).

Sementara itu, komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih kecil dari penduduk dewasa (lihat Tabel 4.3). Pada tahun 2016, persentase penduduk korban kejahatan yang termasuk kelompok anak-anak terbesar berturut-turut adalah provinsi Papua (17,93 persen), Papua Barat (12,21 persen), dan Lampung (9,46 persen).

Data Susenas menunjukkan tingkat persentase melapor ke Polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2015–2016, persentase penduduk Indonesia yang pernah mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkan ke polisi kejadian yang dialaminya tidak lebih dari 20 persen. Pada tahun 2015 sebesar 18,73 persen, dan pada tahun 2015 meningkat

Kurang dari 20 persen rumah tangga melaporkan ke Polisi kejadian kejahatan yang dialaminya

menjadi 19,68 persen. Di sisi lain, ditahun 2015, dari penduduk yang melapor, hanya 81,29 persen penduduk korban kejahatan yang memperoleh penanganan polisi. Persentase ini menurun pada tahun 2016 menjadi hanya 76,68 persen. Data-data ini menunjukkan angka

gelap kejahatan (*dark number*) masih relatif tinggi.

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pencurian sebesar 87,19 persen, kejahatan lainnya sebesar 10,29 persen, penganiayaan sebesar 3,45 persen, pencurian dengan kekerasan sebesar 3,02 persen, dan pelecehan seksual sebesar 1,15 persen. Jika dibandingkan periode sebelumnya, kejadian kejahatan pencurian memiliki pola dengan kecenderungan meningkat. Persentase penduduk korban kejahatan berdasarkan jenis kejahatan secara umum pada masing-masing provinsi dapat dilihat Tabel 4.7 dan 4.8.

DATA SUSENAS (SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL)

https://www.bps.go.id

Tabel 4.1.
Persentase Penduduk Korban Kejahatan
Menurut Provinsi, Tahun 2015 dan 2016

Provinsi	2015	2016
	(1)	(3)
A c e h	0,66	0,66
Sumatera Utara	0,83	0,94
Sumatera Barat	0,81	0,90
Riau	1,12	1,18
Jambi	0,96	0,94
Sumatera Selatan	1,25	1,08
Bengkulu	1,27	1,24
Lampung	1,34	1,10
Kep.Bangka Belitung	1,03	0,60
Kepulauan Riau	0,79	0,82
DKI. Jakarta	1,27	1,38
Jawa Barat	1,00	0,90
Jawa Tengah	0,91	0,82
DI.Yogyakarta	1,39	1,17
Jawa Timur	0,98	0,80
Banten	0,91	0,92
Bali	0,74	0,69
Nusa Tenggara Barat	1,80	1,50
Nusa Tenggara Timur	0,93	1,10
Kalimantan Barat	0,60	0,54
Kalimantan Tengah	0,68	0,69
Kalimantan Selatan	0,97	0,95
Kalimantan Timur	0,61	1,00
Kalimantan Utara*	0,95	1,15
Sulawesi Utara	1,15	1,07
Sulawesi Tengah	1,29	1,35
Sulawesi Selatan	0,84	0,86
Sulawesi Tenggara	1,37	1,24
Gorontalo	1,07	0,97
Sulawesi Barat	0,66	0,80
Maluku	0,99	0,95
Maluku Utara	0,71	0,98
Papua Barat	1,36	1,02
Papua	1,34	1,21
INDONESIA	1,00	0,93

Sumber: Diolah dari Susenas 2015 dan 2016

*) Pengumpulan data provinsi Kalimantan Utara baru dimulai pada Susenas 2015

Tabel 4.2.
Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015 dan 2016

Provinsi	2015		2016	
	L	P	L	P
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	62,75	37,25	70,63	29,37
Sumatera Utara	68,39	31,61	60,73	39,27
Sumatera Barat	60,02	39,98	50,24	49,76
Riau	66,25	33,75	65,82	34,18
Jambi	72,28	27,72	71,20	28,80
Sumatera Selatan	76,61	23,39	75,57	24,43
Bengkulu	67,85	32,15	69,12	30,88
Lampung	74,58	25,42	77,62	22,38
Kep,Bangka Belitung	68,37	31,63	70,88	29,12
Kepulauan Riau	47,36	52,64	50,26	49,74
DKI, Jakarta	57,91	42,09	57,69	42,31
Jawa Barat	68,04	31,96	68,08	31,92
Jawa Tengah	61,71	38,29	62,41	37,59
DI,Yogyakarta	65,80	34,20	58,84	41,16
Jawa Timur	59,64	40,36	63,36	36,64
Banten	70,04	29,96	66,89	33,11
Bali	64,76	35,24	70,38	29,62
Nusa Tenggara Barat	69,78	30,22	65,98	34,02
Nusa Tenggara Timur	69,35	30,65	74,06	25,94
Kalimantan Barat	56,15	43,85	63,36	36,64
Kalimantan Tengah	76,75	23,25	74,78	25,22
Kalimantan Selatan	68,66	31,34	69,67	30,33
Kalimantan Timur	63,46	36,54	62,48	37,52
Kalimantan Utara*	60,05	39,95	62,75	37,25
Sulawesi Utara	72,72	27,28	68,47	31,53
Sulawesi Tengah	64,63	35,37	62,12	37,88
Sulawesi Selatan	61,61	38,39	58,45	41,55
Sulawesi Tenggara	60,60	39,40	66,32	33,68
Gorontalo	59,65	40,35	64,05	35,95
Sulawesi Barat	68,98	31,02	70,62	29,38
Maluku	57,25	42,75	62,79	37,21
Maluku Utara	73,02	26,98	73,42	26,58
Papua Barat	65,48	34,52	73,63	26,37
Papua	69,37	30,63	63,67	36,33
INDONESIA	65,42	34,58	65,32	34,68

Sumber: Diolah dari Susenas 2015 dan 2016 (Persentase terhadap penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk)

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

Tabel 4.3.
Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2015 dan 2016

Provinsi	2015		2016	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	4,25	95,75	6,41	93,59
Sumatera Utara	6,42	93,58	5,59	94,41
Sumatera Barat	7,87	92,13	8,62	91,38
Riau	5,90	94,10	7,50	92,50
Jambi	1,36	98,64	8,50	91,50
Sumatera Selatan	4,91	95,09	2,44	97,56
Bengkulu	4,99	95,01	9,04	90,96
Lampung	6,09	93,91	9,46	90,54
Kep.Bangka Belitung	3,70	96,30	3,16	96,84
Kepulauan Riau	11,34	88,66	3,59	96,41
DKI. Jakarta	5,93	94,07	9,28	90,72
Jawa Barat	7,65	92,35	6,39	93,61
Jawa Tengah	6,99	93,01	5,88	94,12
DI.Yogyakarta	6,16	93,84	3,85	96,15
Jawa Timur	4,72	95,28	7,65	92,35
Banten	2,72	97,28	5,46	94,54
Bali	7,31	92,69	1,23	98,77
Nusa Tenggara Barat	6,32	93,68	4,29	95,71
Nusa Tenggara Timur	3,15	96,85	3,85	96,15
Kalimantan Barat	3,76	96,24	4,93	95,07
Kalimantan Tengah	9,46	90,54	3,95	96,05
Kalimantan Selatan	4,64	95,36	7,81	92,19
Kalimantan Timur	3,36	96,64	7,68	92,32
Kalimantan Utara*	9,43	90,57	5,46	94,54
Sulawesi Utara	4,23	95,77	4,50	95,50
Sulawesi Tengah	3,62	96,38	5,10	94,90
Sulawesi Selatan	6,18	93,82	8,41	91,59
Sulawesi Tenggara	13,02	86,98	8,53	91,47
Gorontalo	8,14	91,86	5,46	94,54
Sulawesi Barat	5,17	94,83	5,93	94,07
Maluku	7,94	92,06	8,00	92,00
Maluku Utara	5,05	94,95	6,22	93,78
Papua Barat	11,25	88,75	12,21	87,79
Papua	6,16	93,84	17,93	82,07
INDONESIA	6,05	93,95	6,68	93,32

Sumber: Diolah dari Susenas 2015 dan 2016 (Persentase terhadap penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk)

Keterangan : Anak= 0-17 tahun , Dewasa = 18 tahun ke atas

Tabel 4.4.
Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan
Yang Melapor ke Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2015 dan 2016

Provinsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Aceh	18,52	19,58
Sumatera Utara	15,11	18,01
Sumatera Barat	26,86	18,43
Riau	19,64	23,34
Jambi	21,67	16,48
Sumatera Selatan	17,59	20,25
Bengkulu	13,73	14,65
Lampung	16,11	18,89
Kep.Bangka Belitung	16,19	12,67
Kepulauan Riau	18,81	18,22
DKI. Jakarta	30,37	30,63
Jawa Barat	19,68	18,65
Jawa Tengah	19,03	15,84
DI.Yogyakarta	18,55	22,75
Jawa Timur	17,81	24,67
Banten	19,64	22,02
Bali	15,35	9,82
Nusa Tenggara Barat	12,00	13,07
Nusa Tenggara Timur	11,22	10,87
Kalimantan Barat	20,98	11,48
Kalimantan Tengah	17,42	17,08
Kalimantan Selatan	18,98	17,75
Kalimantan Timur	17,88	24,19
Kalimantan Utara	21,28	14,44
Sulawesi Utara	19,71	26,58
Sulawesi Tengah	12,29	14,49
Sulawesi Selatan	19,19	25,68
Sulawesi Tenggara	24,87	15,56
Gorontalo	11,95	15,60
Sulawesi Barat	9,57	11,94
Maluku	12,30	14,18
Maluku Utara	18,83	9,54
Papua Barat	25,40	28,48
Papua	14,76	14,01
INDONESIA	18,73	19,68

Sumber: Diolah dari Susenas 2015 dan 2016

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 4.5.
Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapat Penanganan Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2015 dan 2016

Provinsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Aceh	76,98	70,70
Sumatera Utara	77,93	79,34
Sumatera Barat	81,21	90,61
Riau	72,26	68,22
Jambi	85,65	72,99
Sumatera Selatan	80,00	86,74
Bengkulu	91,40	79,81
Lampung	75,42	86,31
Kep.Bangka Belitung	50,66	94,07
Kepulauan Riau	99,41	71,38
DKI. Jakarta	85,52	81,17
Jawa Barat	85,77	66,00
Jawa Tengah	77,25	79,25
DI.Yogyakarta	84,55	73,69
Jawa Timur	81,05	77,45
Banten	77,77	76,85
Bali	79,66	95,66
Nusa Tenggara Barat	74,40	82,61
Nusa Tenggara Timur	78,24	85,96
Kalimantan Barat	76,71	65,78
Kalimantan Tengah	88,37	85,15
Kalimantan Selatan	86,12	80,32
Kalimantan Timur	91,69	72,28
Kalimantan Utara	59,84	100,00
Sulawesi Utara	91,21	83,59
Sulawesi Tengah	89,73	77,27
Sulawesi Selatan	87,34	76,60
Sulawesi Tenggara	79,51	66,60
Gorontalo	72,54	76,92
Sulawesi Barat	82,83	71,41
Maluku	79,17	72,23
Maluku Utara	94,72	90,99
Papua Barat	77,02	78,36
Papua	66,83	75,17
INDONESIA	81,29	76,68

Sumber: Diolah dari Susenas 2015 dan 2016

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 4.6.
Persentase Korban Kejahatan
Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, Tahun 2015 – 2016

Kategori Jenis Kejahatan	2015		2016
	(1)	(2)	(3)
1. Pencurian		84,19	87,19
2. Penganiayaan		3,15	3,45
3. Pencurian dengan kekerasan		2,55	3,02
4. Pelecehan Seksual		0,80	1,15
5. Lainnya		11,82	10,48
6. Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan		2,51	5,29

Sumber: Diolah dari Susenas 2015 dan 2016

Tabel 4.7.
Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan yang Dialami, Tahun 2015

Provinsi	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan kekerasan	Pelecehan Seksual	Lainnya	Lebih dari 1 Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)				
A c e h	87,83	1,55	1,21	1,51	9,18	-
Sumatera Utara	89,70	2,75	2,12	3,79	9,25	5,33
Sumatera Barat	84,09	7,82	3,31	2,50	12,33	11,33
Riau	89,39	4,88	4,19	-	10,14	11,10
Jambi	88,23	1,24	3,23	0,18	11,10	3,80
Sumatera Selatan	88,28	1,76	5,18	-	5,38	0,78
Bengkulu	89,61	4,57	2,52	-	3,86	0,55
Lampung	82,28	3,31	3,61	2,02	11,39	0,59
Kep.Bangka Belitung	85,25	3,85	4,30	-	11,99	7,42
Kepulauan Riau	87,48	4,89	-	1,20	8,07	0,45
DKI. Jakarta	82,09	1,90	2,65	0,54	16,97	4,82
Jawa Barat	84,20	3,18	2,02	0,46	12,90	2,84
Jawa Tengah	76,59	3,65	2,58	-	17,28	0,56
DI.Yogyakarta	77,18	3,68	2,30	1,33	13,69	-
Jawa Timur	82,68	1,90	2,34	0,27	13,34	1,59
Banten	85,98	0,78	2,53	0,75	12,62	2,17
Bali	85,19	0,75	3,65	0,80	12,69	3,03
Nusa Tenggara Barat	87,22	2,10	4,84	1,89	7,46	2,42
Nusa Tenggara Timur	86,88	6,40	2,03	-	5,61	2,80
Kalimantan Barat	92,86	-	-	1,41	7,59	0,45
Kalimantan Tengah	86,28	2,29	1,94	1,01	16,26	8,19
Kalimantan Selatan	86,70	1,37	2,10	-	6,04	-
Kalimantan Timur	84,99	2,21	2,38	-	9,37	-
Kalimantan Utara*	89,58	3,79	-	0,38	7,66	1,02
Sulawesi Utara	88,79	7,03	1,22	0,42	3,99	1,41
Sulawesi Tengah	91,31	1,60	-	1,15	8,15	1,48
Sulawesi Selatan	86,91	5,63	3,11	-	9,83	6,63
Sulawesi Tenggara	86,26	7,26	0,35	0,40	6,20	0,08
Gorontalo	87,98	7,79	-	-	5,89	2,06
Sulawesi Barat	91,06	1,64	-	0,30	5,93	-
Maluku	78,27	9,88	-	0,41	10,77	-
Maluku Utara	93,81	3,17	0,80	2,54	3,68	1,87
Papua Barat	82,22	9,79	1,18	0,01	4,39	0,13
Papua	87,44	7,38	4,87	0,80	7,04	6,74
INDONESIA	84,19	3,15	2,55	1,51	11,82	2,51

Sumber: Diolah dari Susenas

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 4.8.
Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan yang Dialami, Tahun 2016

Provinsi	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan kekerasan	Pelecehan Seksual	Lainnya	Lebih dari 1 Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)				
A c e h	90,58	2,97	2,22	-	7,06	2,82
Sumatera Utara	91,64	4,35	4,08	0,96	4,64	5,67
Sumatera Barat	86,54	7,34	1,44	2,46	7,00	4,78
Riau	89,95	3,75	3,22	1,66	6,95	5,53
Jambi	87,05	5,55	4,22	0,06	4,51	1,39
Sumatera Selatan	86,96	1,89	7,34	-	6,29	2,48
Bengkulu	87,27	3,34	2,84	1,76	5,99	1,21
Lampung	90,69	1,65	2,82	0,20	5,73	1,10
Kep.Bangka Belitung	89,91	2,58	2,45	-	5,05	-
Kepulauan Riau	95,18	1,76	2,98	-	4,91	4,84
DKI. Jakarta	90,22	3,82	3,43	-	6,38	3,85
Jawa Barat	90,19	3,69	4,26	3,30	13,18	14,61
Jawa Tengah	82,91	2,53	1,48	0,44	16,21	3,57
DI.Yogyakarta	74,60	6,75	0,63	3,74	15,32	1,04
Jawa Timur	83,79	1,44	2,74	0,66	13,92	2,55
Banten	87,18	2,29	1,82	0,79	13,25	5,33
Bali	88,54	4,01	0,50	-	9,76	2,81
Nusa Tenggara Barat	88,37	0,93	3,88	0,23	8,13	1,54
Nusa Tenggara Timur	85,44	5,32	0,37	0,60	11,29	3,02
Kalimantan Barat	87,58	2,96	-	0,41	9,95	0,91
Kalimantan Tengah	85,98	2,35	2,00	0,40	9,41	0,14
Kalimantan Selatan	88,16	0,83	2,15	0,28	9,35	0,76
Kalimantan Timur	91,97	4,26	0,92	0,58	9,44	7,17
Kalimantan Utara*	92,88	-	0,40	-	7,76	1,04
Sulawesi Utara	84,20	16,15	5,17	3,82	5,79	15,13
Sulawesi Tengah	86,19	7,07	2,01	1,03	5,20	1,50
Sulawesi Selatan	84,94	4,03	4,33	0,44	8,06	1,80
Sulawesi Tenggara	84,34	6,96	0,70	-	8,85	0,84
Gorontalo	85,92	9,18	1,00	1,60	4,06	1,77
Sulawesi Barat	83,21	1,98	2,36	2,61	13,27	3,43
Maluku	85,80	6,49	-	0,25	7,85	0,39
Maluku Utara	91,56	3,95	2,35	1,20	3,87	2,93
Papua Barat	79,32	12,03	11,00	0,93	3,03	6,31
Papua	86,16	5,06	4,96	0,49	7,42	4,09
INDONESIA	87,19	3,45	3,02	1,15	10,48	5,29

Sumber: Diolah dari Susenas

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

https://www.bps.go.id

KONFLIK MASSAL

V

versi viva pps.go.id

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta perkembangannya selama satu dekade terakhir. Aspek yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat menganggu keamanan.

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (*spatial data*) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

Seperti yang disajikan pada Tabel 5.1, hasil Podes 2008, 2011, dan 2014 memperlihatkan kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir periode sensus terus meningkat dari 2.283 desa/kelurahan pada tahun 2008 menjadi 2.562 desa/kelurahan pada tahun 2014. Secara persentase dibanding

Hasil Podes 2008, 2011, dan 2014 memperlihatkan kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal

jumlah total desa/kelurahan terus meningkat dari 3,03 persen menjadi 3,38 persen pada tahun 2014.

Jenis kejadian perkelahian massal yang dicakup dalam Podes 2008, 2011, dan 2014 meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat, perkelahian antar pelajar dan perkelahian antar suku. Dari Tabel 5.1 nampak bahwa dari hasil Podes 2008, 2011, dan 2014 perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan.

Jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga terus meningkat dari 1.235 desa/kelurahan (1,64 persen) di 2008 menjadi 1.404 desa/kelurahan (1,71 persen). Kondisi yang sama juga terjadi pada jenis perkelahian warga antar desa/kelurahan.

Hasil Podes 2008, 2011, dan 2014 perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu sebagai upaya menanggulangi isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang menganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi (Gurr, dalam Soetopo, 2001): (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuensi; (2) dengan mediasi (perantara).

Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Data Podes 2008, 2011, dan 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 90 persen) dari insiden perkelahian massal yang sering terjadi sudah dapat diselesaikan (Tabel 5.1). Namun, masih terdapat kejadian dimana diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk segera menuntaskan konflik massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya.

Apabila kita melihat lebih rinci ke provinsi, kita dapat melihat variasi dalam perkembangan kejadian perkelahian massal. Selama periode 2008-2011, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua merupakan provinsi-provinsi dengan jumlah terbanyak desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal setahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan total desa/kelurahan pada setiap provinsi, Provinsi DKI Jakarta, Maluku, dan Maluku Utara merupakan yang terbesar persentasenya.

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah kejadian perkelahian massal secara total selama periode tahun 2008-2014, tidak sepenuhnya terlihat pada setiap provinsi. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.2, dari tahun 2008 ke 2011 terdapat 25 provinsi yang mengalami peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan tempat terjadinya perkelahian massal. Sementara dari 2011 ke 2014 provinsi yang mengalami peningkatan dan penurunan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang pernah menjadi ajang perkelahian massal, jumlahnya hampir sama. Peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan ajang perkelahian massal secara terus menerus dari 2008, 2011, ke 2014 terjadi pada 11 provinsi, yaitu: Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Tabel 5.1.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal	2008		2011		2014	
	N	(1)	N	(2)	N	(3)
	(4)	(5)	(6)	(7)		
<i>A. Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal</i>						
1. Ada kejadian	2.283	3,03	2.562	3,26	2.779	3,38
2. Tidak ada kejadian	73.127	96,97	76.047	96,74	79.411	96,47
Total desa/kelurahan	75.410	100,00	78.609	100,00	82.190	100,00
<i>B. Jenis Perkelahian Massal</i>						
1. Antar Kelompok Warga	1.235	1,64	1.348	1,71	1.404	1,71
2. Warga Antar Desa/Kelurahan	939	1,25	1.054	1,34	1.128	1,37
3. Warga dengan Aparat Keamanan	89	0,12	120	0,15	108	0,13
4. Warga dengan Aparat Pemerintah	60	0,08	102	0,13	99	0,12
5. Antar Pelajar/Mahasiswa	108	0,14	210	0,27	327	0,40
6. Antar Suku	118	0,16	102	0,13	70	0,09
7. Lainnya	138	0,18	149	0,19	160	0,19
<i>C. Penyelesaian Perkelahian Massal</i>						
1. Diselesaikan secara damai	2.120	92,86	2.314	90,32	2.564	92,26
2. Tidak dapat diselesaikan	163	7,14	248	9,68	215	7,74
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	2.283	100,00	2.562	100,00	2.779	100,00

Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Tabel 5.2.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	2008		2011		2014	
	N	(1)	N	(2)	N	(3)
A c e h	64	1,00	69	1,06	61	0,94
Sumatera Utara	140	2,43	119	2,05	118	1,93
Sumatera Barat	30	3,25	50	4,84	45	3,93
Riau	56	3,49	47	2,84	38	2,07
Jambi	53	4,07	47	3,43	40	2,58
Sumatera Selatan	27	0,88	51	1,60	67	2,07
Bengkulu	17	1,26	24	1,59	27	1,76
Lampung	37	1,58	40	1,62	34	1,29
Bangka Belitung	22	6,40	28	7,76	24	6,30
Kepulauan Riau	6	1,84	7	1,98	3	0,72
DKI Jakarta	8	3,00	61	22,85	72	26,97
Jawa Barat	270	4,60	195	3,30	259	4,34
Jawa Tengah	262	3,06	194	2,26	252	2,94
DI Yogyakarta	9	2,05	13	2,97	12	2,74
Jawa Timur	176	2,07	162	1,91	132	1,55
Banten	69	4,59	80	5,21	40	2,58
Bali	8	1,12	12	1,68	6	0,84
Nusa Tenggara Barat	56	6,13	68	6,27	76	6,66
Nusa Tenggara Timur	165	5,89	183	6,17	174	5,32
Kalimantan Barat	19	1,06	27	1,37	39	1,85
Kalimantan Tengah	12	0,83	25	1,64	36	2,29
Kalimantan Selatan	32	1,62	13	0,65	26	1,29
Kalimantan Timur	23	1,62	43	2,94	20	1,95
Kalimantan Utara *)	6	1,25
Sulawesi Utara	47	3,15	101	5,97	165	8,99
Sulawesi Tengah	56	3,32	65	3,58	149	7,50
Sulawesi Selatan	77	2,61	113	3,79	145	4,79
Sulawesi Tenggara	55	2,71	54	2,55	73	3,21
Gorontalo	16	2,74	21	2,87	24	3,26
Sulawesi Barat	8	1,49	9	1,41	14	2,16
Maluku	112	12,36	146	14,26	160	14,71
Maluku Utara	98	9,46	110	10,19	186	15,55
Papua Barat	23	1,91	79	5,49	59	3,77
Papua	230	6,95	306	7,80	197	4,04
INDONESIA	2.283	3,03	2.562	3,26	2.779	3,38

Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Catatan : *) Provinsi Kalimantan Utara pada Podes 2008 dan 2011 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi Selama Setahun Terakhir, 2008

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	32	36	5	3
Sumatera Utara	89	51	3	1
Sumatera Barat	18	10	1	-
Riau	28	22	1	1
Jambi	15	29	2	-
Sumatera Selatan	12	9	3	-
Bengkulu	10	4	-	1
Lampung	13	16	2	2
Bangka Belitung	8	14	-	-
Kepulauan Riau	-	2	-	-
DKI Jakarta	4	-	-	-
Jawa Barat	159	114	8	1
Jawa Tengah	113	153	1	2
DI Yogyakarta	4	-	1	-
Jawa Timur	90	65	5	4
Banten	40	29	2	2
Bali	3	5	-	-
Nusa Tenggara Barat	30	23	1	-
Nusa Tenggara Timur	92	67	10	7
Kalimantan Barat	15	3	1	-
Kalimantan Tengah	7	4	1	2
Kalimantan Selatan	17	10	2	1
Kalimantan Timur	11	1	-	-
Sulawesi Utara	29	23	-	-
Sulawesi Tengah	21	30	2	6
Sulawesi Selatan	49	23	4	-
Sulawesi Tenggara	31	20	2	2
Gorontalo	11	5	-	2
Sulawesi Barat	6	1	-	-
Maluku	64	53	10	11
Maluku Utara	45	41	9	4
Papua Barat	13	4	2	2
Papua	156	72	11	6
INDONESIA	1.235	939	89	60

Sumber: Diolah dari Podes 2008

Lanjutan Tabel 5.3

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	5	2	4
Sumatera Utara	4	1	9
Sumatera Barat	4	1	1
Riau	1	1	5
Jambi	3	-	6
Sumatera Selatan	2	2	1
Bengkulu	2	-	-
Lampung	2	-	2
Bangka Belitung	-	1	-
Kepulauan Riau	-	1	3
DKI Jakarta	5	1	-
Jawa Barat	19	2	10
Jawa Tengah	5	1	8
DI Yogyakarta	3	2	-
Jawa Timur	7	2	24
Banten	8	1	1
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3	-	3
Nusa Tenggara Timur	8	9	7
Kalimantan Barat	-	-	1
Kalimantan Tengah	1	1	1
Kalimantan Selatan	1	-	3
Kalimantan Timur	2	5	4
Sulawesi Utara	2	-	-
Sulawesi Tengah	2	1	1
Sulawesi Selatan	3	1	2
Sulawesi Tenggara	4	-	4
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	1
Maluku	2	2	7
Maluku Utara	3	-	17
Papua Barat	1	2	2
Papua	6	79	11
INDONESIA	108	118	138

Sumber: Diolah dari Podes 2008

Tabel 5.4.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	34	29	4	2
Sumatera Utara	69	39	10	3
Sumatera Barat	21	24	-	1
Riau	23	15	5	4
Jambi	14	29	3	1
Sumatera Selatan	25	25	5	7
Bengkulu	9	11	4	1
Lampung	12	19	5	1
Bangka Belitung	11	14	2	-
Kepulauan Riau	2	3	1	2
DKI Jakarta	27	16	2	1
Jawa Barat	102	56	5	6
Jawa Tengah	97	99	2	3
DI Yogyakarta	4	-	-	-
Jawa Timur	88	66	4	4
Banten	42	21	2	-
Bali	9	3	-	-
Nusa Tenggara Barat	40	31	2	4
Nusa Tenggara Timur	79	93	7	3
Kalimantan Barat	13	6	3	1
Kalimantan Tengah	18	4	-	-
Kalimantan Selatan	1	8	-	1
Kalimantan Timur	22	11	1	4
Sulawesi Utara	47	65	3	2
Sulawesi Tengah	22	40	6	1
Sulawesi Selatan	53	58	4	3
Sulawesi Tenggara	25	25	1	2
Gorontalo	7	5	4	3
Sulawesi Barat	6	-	1	1
Maluku	94	55	5	10
Maluku Utara	52	64	5	7
Papua Barat	56	27	3	5
Papua	224	93	21	19
INDONESIA	1.348	1.054	120	102

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Lanjutan Tabel 5.4

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	4	1	3
Sumatera Utara	4	2	13
Sumatera Barat	9	-	2
Riau	1	3	3
Jambi	6	2	2
Sumatera Selatan	5	2	3
Bengkulu	4	1	1
Lampung	2	1	1
Bangka Belitung	1	-	1
Kepulauan Riau	-	-	1
DKI Jakarta	23	-	5
Jawa Barat	44	3	22
Jawa Tengah	4	1	8
DI Yogyakarta	8	1	-
Jawa Timur	8	-	10
Banten	12	1	13
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2	3	4
Nusa Tenggara Timur	10	6	11
Kalimantan Barat	1	3	6
Kalimantan Tengah	-	-	3
Kalimantan Selatan	-	1	2
Kalimantan Timur	2	3	4
Sulawesi Utara	2	-	-
Sulawesi Tengah	3	2	2
Sulawesi Selatan	16	3	3
Sulawesi Tenggara	1	1	2
Gorontalo	2	1	6
Sulawesi Barat	1	-	3
Maluku	11	2	-
Maluku Utara	4	1	4
Papua Barat	2	1	2
Papua	18	57	9
INDONESIA	210	102	149

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Tabel 5.5.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	26	24	1	2
Sumatera Utara	58	43	10	7
Sumatera Barat	29	10	5	-
Riau	14	13	3	1
Jambi	8	22	-	1
Sumatera Selatan	34	23	9	4
Bengkulu	7	8	-	-
Lampung	11	20	1	1
Bangka Belitung	12	11	-	1
Kepulauan Riau	2	-	-	-
DKI Jakarta	34	7	-	-
Jawa Barat	103	91	4	4
Jawa Tengah	120	120	4	5
DI Yogyakarta	5	4	-	-
Jawa Timur	62	51	3	2
Banten	14	12	1	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	33	42	4	2
Nusa Tenggara Timur	90	64	1	12
Kalimantan Barat	29	8	3	-
Kalimantan Tengah	27	1	1	-
Kalimantan Selatan	9	11	-	1
Kalimantan Timur	12	1	1	2
Kalimantan Utara	3	3	-	-
Sulawesi Utara	83	99	8	4
Sulawesi Tengah	54	102	2	1
Sulawesi Selatan	71	68	5	-
Sulawesi Tenggara	34	44	5	3
Gorontalo	14	7	2	4
Sulawesi Barat	6	8	-	-
Maluku	99	68	5	7
Maluku Utara	125	76	5	5
Papua Barat	36	23	6	2
Papua	137	44	19	28
INDONESIA	1.404	1.128	108	99

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lanjutan Tabel 5.5

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	2	4
Sumatera Utara	8	2	11
Sumatera Barat	7	1	2
Riau	1	2	8
Jambi	10	1	2
Sumatera Selatan	7	-	4
Bengkulu	11	1	2
Lampung	1	2	3
Bangka Belitung	2	1	1
Kepulauan Riau	1	1	-
DKI Jakarta	47	-	2
Jawa Barat	89	3	19
Jawa Tengah	11	-	10
DI Yogyakarta	2	1	5
Jawa Timur	12	-	9
Banten	12	-	2
Bali	-	-	3
Nusa Tenggara Barat	9	3	3
Nusa Tenggara Timur	10	6	8
Kalimantan Barat	4	-	2
Kalimantan Tengah	6	-	4
Kalimantan Selatan	2	-	4
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	1
Sulawesi Utara	10	1	4
Sulawesi Tengah	3	2	8
Sulawesi Selatan	18	1	5
Sulawesi Tenggara	3	-	1
Gorontalo	3	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	8	2	1
Maluku Utara	7	2	13
Papua Barat	1	4	3
Papua	9	32	13
INDONESIA	327	70	160

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 5.6.
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi Selama Setahun Terakhir, 2008

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,50	0,56	0,08	0,05
Sumatera Utara	1,54	0,88	0,05	0,02
Sumatera Barat	1,95	1,08	0,11	-
Riau	1,75	1,37	0,06	0,06
Jambi	1,15	2,23	0,15	-
Sumatera Selatan	0,39	0,29	0,10	-
Bengkulu	0,74	0,30	-	0,07
Lampung	0,56	0,68	0,09	0,09
Bangka Belitung	2,33	4,07	-	-
Kepulauan Riau	-	0,61	-	-
DKI Jakarta	1,50	-	-	-
Jawa Barat	2,71	1,94	0,14	0,02
Jawa Tengah	1,32	1,78	0,01	0,02
DI Yogyakarta	0,91	-	0,23	-
Jawa Timur	1,06	0,76	0,06	0,05
Banten	2,66	1,93	0,13	0,13
Bali	0,42	0,70	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,29	2,52	0,11	-
Nusa Tenggara Timur	3,28	2,39	0,36	0,25
Kalimantan Barat	0,84	0,17	0,06	-
Kalimantan Tengah	0,48	0,28	0,07	0,14
Kalimantan Selatan	0,86	0,51	0,10	0,05
Kalimantan Timur	0,78	0,07	-	-
Sulawesi Utara	1,94	1,54	-	-
Sulawesi Tengah	1,25	1,78	0,12	0,36
Sulawesi Selatan	1,66	0,78	0,14	-
Sulawesi Tenggara	1,53	0,99	0,10	0,10
Gorontalo	1,88	0,86	-	0,34
Sulawesi Barat	1,12	0,19	-	-
Maluku	7,06	5,85	1,10	1,21
Maluku Utara	4,34	3,96	0,87	0,39
Papua Barat	1,08	0,33	0,17	0,17
Papua	4,71	2,17	0,33	0,18
INDONESIA	1,64	1,25	0,12	0,08

Sumber: Diolah dari Podes 2008

Lanjutan Tabel 5.6

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
	(1)	(6)	(7)
A c e h	0,08	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,07	0,02	0,16
Sumatera Barat	0,43	0,11	0,11
Riau	0,06	0,06	0,31
Jambi	0,23	-	0,46
Sumatera Selatan	0,06	0,06	0,03
Bengkulu	0,15	-	-
Lampung	0,09	-	0,09
Bangka Belitung	-	0,29	-
Kepulauan Riau	-	0,31	0,92
DKI Jakarta	1,87	0,37	-
Jawa Barat	0,32	0,03	0,17
Jawa Tengah	0,06	0,01	0,09
DI Yogyakarta	0,68	0,46	-
Jawa Timur	0,08	0,02	0,28
Banten	0,53	0,07	0,07
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,33	-	0,33
Nusa Tenggara Timur	0,29	0,32	0,25
Kalimantan Barat	-	-	0,06
Kalimantan Tengah	0,07	0,07	0,07
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,15
Kalimantan Timur	0,14	0,35	0,28
Sulawesi Utara	0,13	-	-
Sulawesi Tengah	0,12	0,06	0,06
Sulawesi Selatan	0,10	0,03	0,07
Sulawesi Tenggara	0,20	-	0,20
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	0,19
Maluku	0,22	0,22	0,77
Maluku Utara	0,29	-	1,64
Papua Barat	0,08	0,17	0,17
Papua	0,18	2,39	0,33
INDONESIA	0,14	0,16	0,18

Sumber: Diolah dari Podes 2008

Tabel 5.7.
Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,52	0,45	0,06	0,03
Sumatera Utara	1,19	0,67	0,17	0,05
Sumatera Barat	2,03	2,32	-	0,10
Riau	1,39	0,91	0,30	0,24
Jambi	1,02	2,11	0,22	0,07
Sumatera Selatan	0,78	0,78	0,16	0,22
Bengkulu	0,60	0,73	0,27	0,07
Lampung	0,49	0,77	0,20	0,04
Bangka Belitung	3,05	3,88	0,55	-
Kepulauan Riau	0,57	0,85	0,28	0,57
DKI Jakarta	10,11	5,99	0,75	0,37
Jawa Barat	1,73	0,95	0,08	0,10
Jawa Tengah	1,13	1,15	0,02	0,03
DI Yogyakarta	0,91	-	-	-
Jawa Timur	1,04	0,78	0,05	0,05
Banten	2,74	1,37	0,13	-
Bali	1,26	0,42	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,69	2,86	0,18	0,37
Nusa Tenggara Timur	2,66	3,14	0,24	0,10
Kalimantan Barat	0,66	0,31	0,15	0,05
Kalimantan Tengah	1,18	0,26	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	0,40	-	0,05
Kalimantan Timur	1,50	0,75	0,07	0,27
Sulawesi Utara	2,78	3,84	0,18	0,12
Sulawesi Tengah	1,21	2,20	0,33	0,06
Sulawesi Selatan	1,78	1,95	0,13	0,10
Sulawesi Tenggara	1,18	1,18	0,05	0,09
Gorontalo	0,96	0,68	0,55	0,41
Sulawesi Barat	0,94	-	0,16	0,16
Maluku	9,18	5,37	0,49	0,98
Maluku Utara	4,82	5,93	0,46	0,65
Papua Barat	3,89	1,88	0,21	0,35
Papua	5,71	2,37	0,54	0,48
INDONESIA	1,71	1,34	0,15	0,13

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Lanjutan Tabel 5.7

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
	(1)	(6)	(7)
A c e h	0,06	0,02	0,05
Sumatera Utara	0,07	0,03	0,22
Sumatera Barat	0,87	-	0,19
Riau	0,06	0,18	0,18
Jambi	0,44	0,15	0,15
Sumatera Selatan	0,16	0,06	0,09
Bengkulu	0,27	0,07	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,04
Bangka Belitung	0,28	-	0,28
Kepulauan Riau	-	-	0,28
DKI Jakarta	8,61	-	1,87
Jawa Barat	0,75	0,05	0,37
Jawa Tengah	0,05	0,01	0,09
DI Yogyakarta	1,83	0,23	-
Jawa Timur	0,09	-	0,12
Banten	0,78	0,07	0,85
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,28	0,37
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,20	0,37
Kalimantan Barat	0,05	0,15	0,31
Kalimantan Tengah	-	-	0,20
Kalimantan Selatan	-	0,05	0,10
Kalimantan Timur	0,14	0,20	0,27
Sulawesi Utara	0,12	-	-
Sulawesi Tengah	0,17	0,11	0,11
Sulawesi Selatan	0,54	0,10	0,10
Sulawesi Tenggara	0,05	0,05	0,09
Gorontalo	0,27	0,14	0,82
Sulawesi Barat	0,16	-	0,47
Maluku	1,07	0,20	-
Maluku Utara	0,37	0,09	0,37
Papua Barat	0,14	0,07	0,14
Papua	0,46	1,45	0,23
INDONESIA	0,27	0,13	0,19

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Tabel 5.8.
Percentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,40	0,37	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,95	0,70	0,16	0,11
Sumatera Barat	2,53	0,87	0,44	-
Riau	0,76	0,71	0,16	0,05
Jambi	0,52	1,42	-	0,06
Sumatera Selatan	1,05	0,71	0,28	0,12
Bengkulu	0,46	0,52	-	-
Lampung	0,42	0,76	0,04	0,04
Bangka Belitung	3,15	2,89	-	0,26
Kepulauan Riau	0,48	-	-	-
DKI Jakarta	12,73	2,62	-	-
Jawa Barat	1,73	1,53	0,07	0,07
Jawa Tengah	1,40	1,40	0,05	0,06
DI Yogyakarta	1,14	0,91	-	-
Jawa Timur	0,73	0,60	0,04	0,02
Banten	0,90	0,77	0,06	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2,89	3,68	0,35	0,18
Nusa Tenggara Timur	2,75	1,96	0,03	0,37
Kalimantan Barat	1,38	0,38	0,14	-
Kalimantan Tengah	1,72	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,55	-	0,05
Kalimantan Timur	1,17	0,10	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,63	0,63	-	-
Sulawesi Utara	4,52	5,39	0,44	0,22
Sulawesi Tengah	2,72	5,14	0,10	0,05
Sulawesi Selatan	2,34	2,24	0,17	-
Sulawesi Tenggara	1,50	1,94	0,22	0,13
Gorontalo	1,90	0,95	0,27	0,54
Sulawesi Barat	0,93	1,23	-	-
Maluku	9,10	6,25	0,46	0,64
Maluku Utara	10,45	6,35	0,42	0,42
Papua Barat	2,30	1,47	0,38	0,13
Papua	2,81	0,90	0,39	0,57
INDONESIA	1,71	1,37	0,13	0,12

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Lanjutan Tabel 5.8

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan
	(1)	(6)	(7)
A c e h	0,11	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,13	0,03	0,18
Sumatera Barat	0,61	0,09	0,17
Riau	0,05	0,11	0,44
Jambi	0,64	0,06	0,13
Sumatera Selatan	0,22	-	0,12
Bengkulu	0,72	0,07	0,13
Lampung	0,04	0,08	0,11
Bangka Belitung	0,52	0,26	0,26
Kepulauan Riau	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	17,60	-	0,75
Jawa Barat	1,49	0,05	0,32
Jawa Tengah	0,13	-	0,12
DI Yogyakarta	0,46	0,23	1,14
Jawa Timur	0,14	-	0,11
Banten	0,77	-	0,13
Bali	-	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	0,79	0,26	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,31	0,18	0,24
Kalimantan Barat	0,19	-	0,09
Kalimantan Tengah	0,38	-	0,25
Kalimantan Selatan	0,10	-	0,20
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,54	0,05	0,22
Sulawesi Tengah	0,15	0,10	0,40
Sulawesi Selatan	0,59	0,03	0,17
Sulawesi Tenggara	0,13	-	0,04
Gorontalo	0,41	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	0,74	0,18	0,09
Maluku Utara	0,59	0,17	1,09
Papua Barat	0,06	0,26	0,19
Papua	0,18	0,66	0,27
INDONESIA	0,40	0,09	0,19

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 5.9.
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	2008		2011		2014	
	N	(1)	N	(2)	N	(3)
	(4)	(5)	(6)	(7)		
Ac e h	61	95,31	66	95,65	54	88,52
Sumatera Utara	122	87,14	101	84,87	103	87,29
Sumatera Barat	26	86,67	31	62,00	44	97,78
Riau	50	89,29	40	85,11	32	84,21
Jambi	50	94,34	42	89,36	39	97,50
Sumatera Selatan	25	92,59	47	92,16	62	92,54
Bengkulu	16	94,12	18	75,00	24	88,89
Lampung	32	86,49	27	67,50	30	88,24
Bangka Belitung	21	95,45	27	96,43	24	100,00
Kepulauan Riau	6	100,00	5	71,43	2	66,67
DKI Jakarta	7	87,50	57	93,44	69	95,83
Jawa Barat	255	94,44	180	92,31	246	94,98
Jawa Tengah	247	94,27	183	94,33	237	94,05
DI Yogyakarta	8	88,89	11	84,62	12	100,00
Jawa Timur	165	93,75	150	92,59	121	91,67
Banten	68	98,55	73	91,25	36	90,00
Bali	6	75,00	10	83,33	5	83,33
Nusa Tenggara Barat	55	98,21	64	94,12	73	96,05
Nusa Tenggara Timur	140	84,85	152	83,06	143	82,18
Kalimantan Barat	16	84,21	21	77,78	38	97,44
Kalimantan Tengah	10	83,33	23	92,00	33	91,67
Kalimantan Selatan	29	90,63	11	84,62	24	92,31
Kalimantan Timur	21	91,30	38	88,37	15	75,00
Kalimantan Utara *)	6	100,00
Sulawesi Utara	43	91,49	94	93,07	151	91,52
Sulawesi Tengah	53	94,64	64	98,46	142	95,30
Sulawesi Selatan	73	94,81	107	94,69	140	96,55
Sulawesi Tenggara	53	96,36	49	90,74	68	93,15
Gorontalo	14	87,50	19	90,48	19	79,17
Sulawesi Barat	8	100,00	7	77,78	10	71,43
Maluku	101	90,18	126	86,30	147	91,88
Maluku Utara	94	95,92	103	93,64	178	95,70
Papua Barat	21	91,30	73	92,41	56	94,92
Papua	224	97,39	295	96,41	181	91,88
INDONESIA	2.120	92,86	2.314	90,32	2.564	92,26

Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

Catatan : *) Provinsi Kalimantan Utara pada Podes 2008 dan 2011 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

VI

UPAYA MENJAGA KEAMANAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan merupakan data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Indonesia (pendataan Potensi Desa). Sejalan dengan itu, tingkat dan perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan pada bagian ini akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

Pendataan Potensi Desa (Podes) menanyakan upaya warga desa untuk menjaga keamanan lingkungan dalam setahun terakhir, di antaranya dengan cara membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan (kamling), menambah jumlah anggota hansip/linmas, dan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 dan 2011, terjadi peningkatan jumlah dan persentase desa/kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada 2014. Dari Tabel 6.1 terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2014 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan, membangun pos keamanan lingkungan (poskamling), membentuk regu keamanan lingkungan, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas masing-masing dengan cakupan jumlah desa/kelurahan sebesar 58,84 persen; 50,63 persen; 43,35 persen; dan 23,48

Pada 2014 lebih dari separuh Desa/Kelurahan di Indonesia melakukan kegiatan menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu (1x24 jam) dan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling)

persen. Dengan kata lain, pada 2014 lebih dari separuh Desa/Kelurahan di Indonesia melakukan kegiatan menjaga keamanan dengan menggiatkan pelaporan tamu dan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling).

Sementara itu, pada 2011 upaya yang dilakukan warga dengan cakupan desa/kelurahan terbanyak berturut-turut adalah memeriksa warga luar desa yang masuk (44,50 persen), membangun

poskamling (39,62 persen), dan membentuk regu keamanan lingkungan (39,80 persen).

Gambaran upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut provinsi selama periode 2008-2011 disajikan pada Tabel 6.2 sampai dengan Tabel 6.11. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) meningkat hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Selain dari aspek warga, upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat berwenang dalam hal ini adalah Polisi. Data Podes juga menyajikan Desa/Kelurahan yang pada wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.13 menunjukkan hanya sekitar 10,6 persen dari keseluruhan Desa/Kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Namun, dari sekitar 89,4 persen Desa/Kelurahan yang tidak ada pos polisi sekitar 71,32 persen diantaranya menyatakan akses ke Pos Polisi terdekat cenderung mudah dan mudah sekali.

Pada 2014 hanya sekitar 10,6 persen dari keseluruhan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda)

Tabel 6.1
Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	2008		2011		2014	
	Jumlah	(1)	Jumlah	(4)	Jumlah	(6)
	(2)	(3)	(5)		(7)	
1. Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	35.089	46,55	31.145	39,62	41.611	50,63
2. Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	35.324	48,46	31.288	39,80	35.629	43,35
3. Menambah Jumlah Anggota Hansip	19.233	25,63	12.620	16,05	19.299	23,48
4. Memeriksa Setiap Orang Asing	34.921	46,33	34.982	44,50	-	-
Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*	-	-	-	-	48.357	58,84

Sumber : Diolah dari Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014

: Pada 2014 pertanyaan diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

Tabel 6.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan
Tahun 2008

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2.633	2.244	702	3.322
Sumatera Utara	1.397	1.482	691	1.708
Sumatera Barat	598	482	191	398
Riau	864	856	570	867
Jambi	638	478	248	512
Sumatera Selatan	1.720	1.647	928	1.295
Bengkulu	610	605	324	565
Lampung	1.578	1.767	845	1.332
Kep.Bangka Belitung	153	144	57	125
Kepulauan Riau	137	117	98	150
DKI. Jakarta	190	232	194	182
Jawa Barat	4.357	4.459	2.632	4.076
Jawa Tengah	3.408	4.333	1.986	4.211
DI.Yogyakarta	267	295	127	173
Jawa Timur	3.557	3.984	2.135	4.527
Banten	1.136	1.079	543	757
Bali	322	278	134	523
Nusa Tenggara Barat	642	584	369	438
Nusa Tenggara Timur	1.520	1.390	1.059	1.154
Kalimantan Barat	487	515	364	596
Kalimantan Tengah	913	728	591	570
Kalimantan Selatan	1.003	830	381	695
Kalimantan Timur	719	651	412	472
Sulawesi Utara	831	870	694	1.176
Sulawesi Tengah	915	951	483	942
Sulawesi Selatan	1.900	1.580	898	1.439
Sulawesi Tenggara	1.162	1.015	572	878
Gorontalo	185	295	150	345
Sulawesi Barat	331	249	126	237
Maluku	319	342	253	305
Maluku Utara	237	349	229	438
Papua Barat	137	166	104	212
Papua	223	327	233	301
INDONESIA	35.089	35.324	19.323	34.921

Sumber: Diolah dari Podes 2008

Tabel 6.3
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan
Tahun 2011

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2.797	2.154	657	3.587
Sumatera Utara	1.561	1.785	363	1.907
Sumatera Barat	624	491	128	527
Riau	842	784	365	814
Jambi	625	469	130	486
Sumatera Selatan	1.536	1.478	533	1.426
Bengkulu	667	663	231	623
Lampung	1.359	1.591	572	1.263
Kep.Bangka Belitung	142	170	57	154
Kepulauan Riau	141	181	102	182
DKI. Jakarta	186	232	171	181
Jawa Barat	3.833	3.829	1.889	4.041
Jawa Tengah	2.574	3.395	1.297	4.467
DI.Yogyakarta	272	257	114	167
Jawa Timur	3.119	3.602	1.450	4.611
Banten	977	971	380	880
Bali	189	164	84	484
Nusa Tenggara Barat	605	587	129	415
Nusa Tenggara Timur	955	916	545	858
Kalimantan Barat	470	503	195	623
Kalimantan Tengah	775	545	231	564
Kalimantan Selatan	664	419	151	537
Kalimantan Timur	738	620	300	525
Sulawesi Utara	803	857	490	1.290
Sulawesi Tengah	780	816	394	806
Sulawesi Selatan	1.685	1.353	440	1.303
Sulawesi Tenggara	978	923	283	790
Gorontalo	181	288	168	328
Sulawesi Barat	358	271	86	193
Maluku	185	259	110	268
Maluku Utara	175	217	161	250
Papua Barat	99	146	104	121
Papua	250	352	310	311
INDONESIA	31.145	31.288	12.620	34.982

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Tabel 6.4
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan
Tahun 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	2.819	1.927	656	5.375
Sumatera Utara	1.368	1.056	324	2.248
Sumatera Barat	813	563	236	770
Riau	1.083	915	357	1.118
Jambi	1.010	750	328	1.002
Sumatera Selatan	1.902	1.636	738	2.044
Bengkulu	1.118	1.019	402	1.003
Lampung	2.032	1.933	1.118	1.982
Kep.Bangka Belitung	210	157	113	272
Kepulauan Riau	193	176	165	294
DKI. Jakarta	227	223	138	245
Jawa Barat	4.976	4.610	2.445	5.029
Jawa Tengah	5.098	4.595	2.269	6.218
DI.Yogyakarta	365	310	195	329
Jawa Timur	5.171	4.469	2.890	6.268
Banten	1.181	906	497	1.044
Bali	374	445	97	499
Nusa Tenggara Barat	826	677	324	597
Nusa Tenggara Timur	772	858	622	746
Kalimantan Barat	548	488	433	952
Kalimantan Tengah	991	734	467	1.035
Kalimantan Selatan	1.167	640	368	1.124
Kalimantan Timur	758	664	351	796
Kalimantan Utara	177	134	73	250
Sulawesi Utara	1.090	1.166	611	1.517
Sulawesi Tengah	1.105	1.129	612	1.296
Sulawesi Selatan	1.941	1.256	792	1.322
Sulawesi Tenggara	1.040	802	403	885
Gorontalo	253	401	254	483
Sulawesi Barat	342	227	173	258
Maluku	183	200	188	470
Maluku Utara	159	197	183	450
Papua Barat	132	145	143	213
Papua	187	221	334	223
INDONESIA	41.611	35.629	19.299	48.357

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 6.5
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2008

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	40,99	34,93	10,93	51,71
Sumatera Utara	24,22	25,70	11,98	29,62
Sumatera Barat	64,72	52,16	20,67	43,07
Riau	53,87	53,37	35,54	54,05
Jambi	48,96	36,68	19,03	39,29
Sumatera Selatan	55,86	53,49	30,14	42,06
Bengkulu	45,15	44,78	23,98	41,82
Lampung	67,46	75,55	36,13	56,95
Kep.Bangka Belitung	44,48	41,86	16,57	36,34
Kepulauan Riau	42,02	35,89	30,06	46,01
DKI. Jakarta	71,16	86,89	72,66	68,16
Jawa Barat	74,21	75,95	44,83	69,43
Jawa Tengah	39,75	50,54	23,16	49,11
DI.Yogyakarta	60,96	67,35	29,00	39,50
Jawa Timur	41,82	46,84	25,10	53,23
Banten	75,53	71,74	36,10	50,33
Bali	45,22	39,04	18,82	73,46
Nusa Tenggara Barat	70,32	63,96	40,42	47,97
Nusa Tenggara Timur	54,23	49,59	37,78	41,17
Kalimantan Barat	27,19	28,75	20,32	33,28
Kalimantan Tengah	63,05	50,28	40,81	39,36
Kalimantan Selatan	50,81	42,05	19,30	35,21
Kalimantan Timur	50,74	45,94	29,08	33,31
Sulawesi Utara	55,62	58,23	46,45	78,71
Sulawesi Tengah	54,27	56,41	28,65	55,87
Sulawesi Selatan	64,49	53,63	30,48	48,85
Sulawesi Tenggara	57,30	50,05	28,21	43,29
Gorontalo	31,68	50,51	25,68	59,08
Sulawesi Barat	61,75	46,46	23,51	44,22
Maluku	35,21	37,75	27,92	33,66
Maluku Utara	22,88	33,69	22,10	42,28
Papua Barat	11,37	13,78	8,63	17,59
Papua	6,80	9,97	7,11	9,18
INDONESIA	46,55	46,86	25,63	46,33

Sumber: Diolah dari Podes 2008

Tabel 6.6
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Tahun 2011

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43,14	33,23	10,13	55,33
Sumatera Utara	26,93	30,79	6,26	32,90
Sumatera Barat	60,41	47,53	12,39	51,02
Riau	50,88	47,37	22,05	49,18
Jambi	45,55	34,18	9,48	35,42
Sumatera Selatan	48,21	46,39	16,73	44,76
Bengkulu	44,20	43,94	15,31	41,29
Lampung	55,15	64,57	23,21	51,26
Kep.Bangka Belitung	39,34	47,09	15,79	42,66
Kepulauan Riau	39,94	51,27	28,90	51,56
DKI. Jakarta	69,66	86,89	64,04	67,79
Jawa Barat	64,91	64,84	31,99	68,43
Jawa Tengah	30,01	39,58	15,12	52,08
DI.Yogyakarta	62,10	58,68	26,03	38,13
Jawa Timur	36,69	42,37	17,05	54,23
Banten	63,65	63,26	24,76	57,33
Bali	26,40	22,91	11,73	67,60
Nusa Tenggara Barat	55,81	54,15	11,90	38,28
Nusa Tenggara Timur	32,20	30,88	18,37	28,93
Kalimantan Barat	23,89	25,57	9,91	31,67
Kalimantan Tengah	50,72	35,67	15,12	36,91
Kalimantan Selatan	33,20	20,95	7,55	26,85
Kalimantan Timur	50,38	42,32	20,48	35,84
Sulawesi Utara	47,43	50,62	28,94	76,20
Sulawesi Tengah	42,98	44,96	21,71	44,41
Sulawesi Selatan	56,51	45,37	14,76	43,70
Sulawesi Tenggara	46,11	43,52	13,34	37,25
Gorontalo	24,76	39,40	22,98	44,87
Sulawesi Barat	56,11	42,48	13,48	30,25
Maluku	18,07	25,29	10,74	26,17
Maluku Utara	16,22	20,11	14,92	23,17
Papua Barat	6,88	10,15	7,23	8,41
Papua	6,37	8,97	7,90	7,93
INDONESIA	39,62	39,80	16,05	44,50

Sumber: Diolah dari Podes 2011

Tabel 6.7
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan
Tahun 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43,29	29,59	10,07	82,54
Sumatera Utara	22,41	17,30	5,31	36,83
Sumatera Barat	71,00	49,17	20,61	67,25
Riau	59,02	49,86	19,46	60,93
Jambi	65,12	48,36	21,15	64,60
Sumatera Selatan	58,76	50,54	22,80	63,14
Bengkulu	72,98	66,51	26,24	65,47
Lampung	77,20	73,44	42,48	75,30
Kep.Bangka Belitung	55,12	41,21	29,66	71,39
Kepulauan Riau	46,51	42,41	39,76	70,84
DKI Jakarta	85,02	83,52	51,69	91,76
Jawa Barat	83,46	77,32	41,01	84,35
Jawa Tengah	59,43	53,57	26,45	72,49
DI.Yogyakarta	83,33	70,78	44,52	75,11
Jawa Timur	60,82	52,56	33,99	73,72
Banten	76,14	58,41	32,04	67,31
Bali	52,23	62,15	13,55	69,69
Nusa Tenggara Barat	72,39	59,33	28,40	52,32
Nusa Tenggara Timur	23,61	26,24	19,02	22,81
Kalimantan Barat	25,98	23,14	20,53	45,14
Kalimantan Tengah	63,16	46,78	29,76	65,97
Kalimantan Selatan	58,12	31,87	18,33	55,98
Kalimantan Timur	73,88	64,72	34,21	77,58
Kalimantan Utara	36,95	27,97	15,24	52,19
Sulawesi Utara	59,37	63,51	33,28	82,63
Sulawesi Tengah	55,64	56,85	30,82	65,26
Sulawesi Selatan	64,06	41,45	26,14	43,63
Sulawesi Tenggara	45,77	35,30	17,74	38,95
Gorontalo	34,38	54,48	34,51	65,63
Sulawesi Barat	52,78	35,03	26,70	39,81
Maluku	16,82	18,38	17,28	43,20
Maluku Utara	13,29	16,47	15,30	37,63
Papua Barat	8,42	9,25	9,13	13,59
Papua	3,84	4,54	6,86	4,58
INDONESIA	50,63	43,35	23,48	58,84

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa 2014

Tabel 6.8
Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun
Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi,
Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Jumlah			Percentase		
	2008	2011	2014	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2.633	2.797	2.819	40,99	10,13	43,29
Sumatera Utara	1.397	1.561	1.368	24,22	6,26	22,41
Sumatera Barat	598	624	813	64,72	12,39	71,00
Riau	864	842	1.083	53,87	22,05	59,02
Jambi	638	625	1.010	48,96	9,48	65,12
Sumatera Selatan	1.720	1.536	1.902	55,86	16,73	58,76
Bengkulu	610	667	1.118	45,15	15,31	72,98
Lampung	1.578	1.359	2.032	67,46	23,21	77,20
Kep.Bangka Belitung	153	142	210	44,48	15,79	55,12
Kepulauan Riau	137	141	193	42,02	28,90	46,51
DKI. Jakarta	190	186	227	71,16	64,04	85,02
Jawa Barat	4.357	3.833	4.976	74,21	31,99	83,46
Jawa Tengah	3.408	2.574	5.098	39,75	15,12	59,43
DI.Yogyakarta	267	272	365	60,96	26,03	83,33
Jawa Timur	3.557	3.119	5.171	41,82	17,05	60,82
Banten	1.136	977	1.181	75,53	24,76	76,14
Bali	322	189	374	45,22	11,73	52,23
Nusa Tenggara Barat	642	605	826	70,32	11,90	72,39
Nusa Tenggara Timur	1.520	955	772	54,23	18,37	23,61
Kalimantan Barat	487	470	548	27,19	9,91	25,98
Kalimantan Tengah	913	775	991	63,05	15,12	63,16
Kalimantan Selatan	1.003	664	1.167	50,81	7,55	58,12
Kalimantan Timur	719	738	758	50,74	20,48	73,88
Kalimantan Utara	-	-	177	-	-	36,95
Sulawesi Utara	831	803	1.090	55,62	47,43	59,37
Sulawesi Tengah	915	780	1.105	54,27	42,98	55,64
Sulawesi Selatan	1.900	1.685	1.941	64,49	56,51	64,06
Sulawesi Tenggara	1.162	978	1.040	57,30	46,11	45,77
Gorontalo	185	181	253	31,68	24,76	34,38
Sulawesi Barat	331	358	342	61,75	56,11	52,78
Maluku	319	185	183	35,21	18,07	16,82
Maluku Utara	237	175	159	22,88	16,22	13,29
Papua Barat	137	99	132	11,37	6,88	8,42
Papua	223	250	187	6,80	6,37	3,84
INDONESIA	35.089	31.145	41.611	46,55	39,62	50,63

Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011 dan Podes 2014

Tabel 6.9
Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Jumlah			Percentase		
	2008	2011	2014	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2.244	2.154	2.819	34,93	33,23	29,59
Sumatera Utara	1.482	1.785	1.368	25,70	30,79	17,30
Sumatera Barat	482	491	813	52,16	47,53	49,17
Riau	856	784	1.083	53,37	47,37	49,86
Jambi	478	469	1.010	36,68	34,18	48,36
Sumatera Selatan	1.647	1.478	1.902	53,49	46,39	50,54
Bengkulu	605	663	1.118	44,78	43,94	66,51
Lampung	1.767	1.591	2.032	75,55	64,57	73,44
Kep.Bangka Belitung	144	170	210	41,86	47,09	41,21
Kepulauan Riau	117	181	193	35,89	51,27	42,41
DKI. Jakarta	232	232	227	86,89	86,89	83,52
Jawa Barat	4.459	3.829	4.976	75,95	64,84	77,32
Jawa Tengah	4.333	3.395	5.098	50,54	39,58	53,57
DI.Yogyakarta	295	257	365	67,35	58,68	70,78
Jawa Timur	3.984	3.602	5.171	46,84	42,37	52,56
Banten	1.079	971	1.181	71,74	63,26	58,41
Bali	278	164	374	39,04	22,91	62,15
Nusa Tenggara Barat	584	587	826	63,96	54,15	59,33
Nusa Tenggara Timur	1.390	916	772	49,59	30,88	26,24
Kalimantan Barat	515	503	548	28,75	25,57	23,14
Kalimantan Tengah	728	545	991	50,28	35,67	46,78
Kalimantan Selatan	830	419	1.167	42,05	20,95	31,87
Kalimantan Timur	651	620	758	45,94	42,32	64,72
Kalimantan Utara	-	-	177	-	-	27,97
Sulawesi Utara	870	857	1.090	58,23	50,62	63,51
Sulawesi Tengah	951	816	1.105	56,41	44,96	56,85
Sulawesi Selatan	1.580	1.353	1.941	53,63	45,37	41,45
Sulawesi Tenggara	1.015	923	1.040	50,05	43,52	35,30
Gorontalo	295	288	253	50,51	39,40	54,48
Sulawesi Barat	249	271	342	46,46	42,48	35,03
Maluku	342	259	183	37,75	25,29	18,38
Maluku Utara	349	217	159	33,69	20,11	16,47
Papua Barat	166	146	132	13,78	10,15	9,25
Papua	327	352	187	9,97	8,97	4,54
INDONESIA	35.324	31.288	41.611	46,86	39,80	43,35

Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011 dan Podes 2014

Tabel 6.10
**Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah
Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi,
Tahun 2008, 2011, dan 2014**

Provinsi	Jumlah			Percentase		
	2008	2011	2014	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	702	657	656	10,93	10,13	10,07
Sumatera Utara	691	363	324	11,98	6,26	5,31
Sumatera Barat	191	128	236	20,67	12,39	20,61
Riau	570	365	357	35,54	22,05	19,46
Jambi	248	130	328	19,03	9,48	21,15
Sumatera Selatan	928	533	738	30,14	16,73	22,80
Bengkulu	324	231	402	23,98	15,31	26,24
Lampung	845	572	1.118	36,13	23,21	42,48
Kep.Bangka Belitung	57	57	113	16,57	15,79	29,66
Kepulauan Riau	98	102	165	30,06	28,90	39,76
DKI. Jakarta	194	171	138	72,66	64,04	51,69
Jawa Barat	2.632	1.889	2.445	44,83	31,99	41,01
Jawa Tengah	1.986	1.297	2.269	23,16	15,12	26,45
DI.Yogyakarta	127	114	195	29,00	26,03	44,52
Jawa Timur	2.135	1.450	2.890	25,10	17,05	33,99
Banten	543	380	497	36,10	24,76	32,04
Bali	134	84	97	18,82	11,73	13,55
Nusa Tenggara Barat	369	129	324	40,42	11,90	28,40
Nusa Tenggara Timur	1.059	545	622	37,78	18,37	19,02
Kalimantan Barat	364	195	433	20,32	9,91	20,53
Kalimantan Tengah	591	231	467	40,81	15,12	29,76
Kalimantan Selatan	381	151	368	19,30	7,55	18,33
Kalimantan Timur	412	300	351	29,08	20,48	34,21
Kalimantan Utara	-	-	73	-	-	15,24
Sulawesi Utara	694	490	611	46,45	28,94	33,28
Sulawesi Tengah	483	394	612	28,65	21,71	30,82
Sulawesi Selatan	898	440	792	30,48	14,76	26,14
Sulawesi Tenggara	572	283	403	28,21	13,34	17,74
Gorontalo	150	168	254	25,68	22,98	34,51
Sulawesi Barat	126	86	173	23,51	13,48	26,70
Maluku	253	110	188	27,92	10,74	17,28
Maluku Utara	229	161	183	22,10	14,92	15,30
Papua Barat	104	104	143	8,63	7,23	9,13
Papua	233	310	334	7,11	7,90	6,86
INDONESIA	19.323	12.620	19.299	25,63	16,05	23,48

Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011 dan Podes 2014

Tabel 6.11

Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, Tahun 2008, 2011, dan 2014

Provinsi	Jumlah			Percentase		
	2008	2011	2014	2008	2011	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	3.322	3.587	5.375	51,71	55,33	82,54
Sumatera Utara	1.708	1.907	2.248	29,62	32,90	36,83
Sumatera Barat	398	527	770	43,07	51,02	67,25
Riau	867	814	1.118	54,05	49,18	60,93
Jambi	512	486	1.002	39,29	35,42	64,60
Sumatera Selatan	1.295	1.426	2.044	42,06	44,76	63,14
Bengkulu	565	623	1.003	41,82	41,29	65,47
Lampung	1.332	1.263	1.982	56,95	51,26	75,30
Kep.Bangka Belitung	125	154	272	36,34	42,66	71,39
Kepulauan Riau	150	182	294	46,01	51,56	70,84
DKI. Jakarta	182	181	245	68,16	67,79	91,76
Jawa Barat	4.076	4.041	5.029	69,43	68,43	84,35
Jawa Tengah	4.211	4.467	6.218	49,11	52,08	72,49
DI.Yogyakarta	173	167	329	39,50	38,13	75,11
Jawa Timur	4.527	4.611	6.268	53,23	54,23	73,72
Banten	757	880	1.044	50,33	57,33	67,31
Bali	523	484	499	73,46	67,60	69,69
Nusa Tenggara Barat	438	415	597	47,97	38,28	52,32
Nusa Tenggara Timur	1.154	858	746	41,17	28,93	22,81
Kalimantan Barat	596	623	952	33,28	31,67	45,14
Kalimantan Tengah	570	564	1.035	39,36	36,91	65,97
Kalimantan Selatan	695	537	1.124	35,21	26,85	55,98
Kalimantan Timur	472	525	796	33,31	35,84	77,58
Kalimantan Utara	-	-	250	-	-	52,19
Sulawesi Utara	1.176	1.290	1.517	78,71	76,20	82,63
Sulawesi Tengah	942	806	1.296	55,87	44,41	65,26
Sulawesi Selatan	1.439	1.303	1.322	48,85	43,70	43,63
Sulawesi Tenggara	878	790	885	43,29	37,25	38,95
Gorontalo	345	328	483	59,08	44,87	65,63
Sulawesi Barat	237	193	258	44,22	30,25	39,81
Maluku	305	268	470	33,66	26,17	43,20
Maluku Utara	438	250	450	42,28	23,17	37,63
Papua Barat	212	121	213	17,59	8,41	13,59
Papua	301	311	223	9,18	7,93	4,58
INDONESIA	34.921	34.982	48.357	46,33	44,50	58,84

Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011 dan Podes 2014

Tabel 6.12
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A c e h	355	6.157	1.118	4.353	582	104
Sumatera Utara	432	5.672	786	3.485	1.114	287
Sumatera Barat	210	935	201	650	66	18
Riau	380	1.455	295	891	243	26
Jambi	202	1.349	287	894	145	23
Sumatera Selatan	313	2.924	393	2.162	329	40
Bengkulu	105	1.427	290	940	175	22
Lampung	269	2.363	386	1.649	282	46
Kep.Bangka Belitung	69	312	103	198	10	1
Kepulauan Riau	101	314	77	168	55	14
DKI. Jakarta	182	85	42	43		
Jawa Barat	813	5.149	1.163	3.583	365	38
Jawa Tengah	755	7.823	1.949	5.641	213	20
DI.Yogyakarta	117	321	125	196		
Jawa Timur	949	7.553	2.472	4.835	220	26
Banten	201	1.350	295	887	150	18
Bali	144	572	230	342		
Nusa Tenggara Barat	156	985	294	596	72	23
Nusa Tenggara Timur	310	2.960	350	1.487	900	223
Kalimantan Barat	294	1.815	176	884	577	178
Kalimantan Tengah	187	1.382	115	692	457	118
Kalimantan Selatan	217	1.791	350	1.193	210	38
Kalimantan Timur	180	846	153	387	239	67
Kalimantan Utara	61	418	44	164	139	71
Sulawesi Utara	168	1.668	463	1.007	165	33
Sulawesi Tengah	277	1.709	350	975	275	109
Sulawesi Selatan	360	2.670	632	1.566	361	111
Sulawesi Tenggara	167	2.105	404	1.298	324	79
Gorontalo	59	677	226	365	68	18
Sulawesi Barat	59	589	94	266	163	66
Maluku	125	963	118	392	328	125
Maluku Utara	107	1.089	212	481	292	104
Papua Barat	108	1.459	127	416	648	268
Papua	280	4.591	247	966	1.602	1.776
INDONESIA	8.712	73.478	14.567	44.052	10.769	4.090

Sumber: Diolah dari Podes 2014

Tabel 6.13
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,45	94,55	17,17	66,85	8,94	1,60
Sumatera Utara	7,08	92,92	12,88	57,09	18,25	4,70
Sumatera Barat	18,34	81,66	17,55	56,77	5,76	1,57
Riau	20,71	79,29	16,08	48,56	13,24	1,42
Jambi	13,02	86,98	18,50	57,64	9,35	1,48
Sumatera Selatan	9,67	90,33	12,14	66,79	10,16	1,24
Bengkulu	6,85	93,15	18,93	61,36	11,42	1,44
Lampung	10,22	89,78	14,67	62,65	10,71	1,75
Kep.Bangka Belitung	18,11	81,89	27,03	51,97	2,62	0,26
Kepulauan Riau	24,34	75,66	18,55	40,48	13,25	3,37
DKI. Jakarta	68,16	31,84	15,73	16,10	-	-
Jawa Barat	13,64	86,36	19,51	60,10	6,12	0,64
Jawa Tengah	8,80	91,20	22,72	65,76	2,48	0,23
DI.Yogyakarta	26,71	73,29	28,54	44,75	-	-
Jawa Timur	11,16	88,84	29,08	56,87	2,59	0,31
Banten	12,96	87,04	19,02	57,19	9,67	1,16
Bali	20,11	79,89	32,12	47,77	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,67	86,33	25,77	52,23	6,31	2,02
Nusa Tenggara Timur	9,48	90,52	10,70	45,47	27,52	6,82
Kalimantan Barat	13,94	86,06	8,35	41,92	27,36	8,44
Kalimantan Tengah	11,92	88,08	7,33	44,10	29,13	7,52
Kalimantan Selatan	10,81	89,19	17,43	59,41	10,46	1,89
Kalimantan Timur	17,54	82,46	14,91	37,72	23,29	6,53
Kalimantan Utara	12,73	87,27	9,19	34,24	29,02	14,82
Sulawesi Utara	9,15	90,85	25,22	54,85	8,99	1,80
Sulawesi Tengah	13,95	86,05	17,62	49,09	13,85	5,49
Sulawesi Selatan	11,88	88,12	20,86	51,68	11,91	3,66
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	17,78	57,13	14,26	3,48
Gorontalo	8,02	91,98	30,71	49,59	9,24	2,45
Sulawesi Barat	9,10	90,90	14,51	41,05	25,15	10,19
Maluku	11,49	88,51	10,85	36,03	30,15	11,49
Maluku Utara	8,95	91,05	17,73	40,22	24,41	8,70
Papua Barat	6,89	93,11	8,10	26,55	41,35	17,10
Papua	5,75	94,25	5,07	19,83	32,89	36,46
INDONESIA	10,60	89,40	17,72	53,60	13,10	4,98

Sumber: Diolah dari Podes 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. (2008). Statistik Potensi Desa Indonesia 2008. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik Potensi Desa Indonesia 2011. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Statistik Potensi Desa Indonesia 2014. Jakarta : BPS.
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Hagan, Frank E. (1989). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Chicago: Nelson-Hall.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2013). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2012. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2014). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2013. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2015). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2014. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2016). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2015. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2017). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2016. Jakarta: Mabes POLRI.

- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.
- Mustofa, Muhammad. (2011). Kriminologi Edisi 2 (Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Sianturi, L.M. (1985). Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.
- Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang : Universitas Negeri Malang.
- UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC). (2015). *International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0*.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021)3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2089-5291



9 772089 529154